



PEMERINTAH KOTA DUMAI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Tuanku Tambusai-Bagan Besar Telp. (0765) 440414 Fax. 440415
DUMAI

KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PENILAIAN RISIKO KEGIATAN
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyebutkan bahwa kewajiban bagi Instansi Pemerintah untuk melakukan penilaian resiko;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Walikota Dumai Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai yang menyebutkan pimpinan satuan/unit kerja sebagai Unit Pemilik Risiko bertanggungjawab melakukan pengelolaan resiko di lingkup kerjanya;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Dumai tentang Penilaian Risiko Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036), sebgaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Walikota Dumai Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Resiko di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 34 Seri E);
10. Peraturan Walikota Dumai Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 13 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN PENILAIAN RISIKO KEGIATAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024.

KESATU : Penetapan Penilaian Risiko Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai untuk Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi perhatian oleh seluruh ASN dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai dalam melaksanakan Kegiatan Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal 04 Januari 2024

a.n WALIKOTA DUMAI,
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Dumai



DRS. BUDHI HASNUL.M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19740213 199303 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Walikota Dumai di Dumai (sebagai laporan)
2. Inspektur Kota Dumai di Dumai

Form 4
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Dumai
Tahun Penilaian	: 2024
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026
Sumber data	: RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026
Visi	Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu
Misi Strategis RPJMD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berjati Diri Melayu 3. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas 4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik
Penetapan Konteks Misi Risiko Strategis Pemda	4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik
Tujuan Strategis RPJMD	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera 1.2 Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah 2.1 Membangun masyarakat Dumai yang Produktif, berdaya saing dan sejahtera 3.1 Mewujudkan infrastruktur dan Ruang kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan 3.2 Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana alam dan non alam 4.1 Meningkatkan Reformasi Birokrasi
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	4.1 Meningkatkan Reformasi Birokrasi
Sasaran RPJMD	4.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	<p>4.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah</p> <p>Akuntabilitas pemerintah daerah merupakan pertanggungjawaban dari tugas, kewajiban dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang harus dilakukan dengan mendayagunakan secara optimal sumberdaya dan potensi yang tersedia secara benar dengan hasil yang terukur sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.</p>
IKU Sasaran RPJMD	<p>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah</p> <p>Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Setiap Tahun</p> <p>Indeks Manajemen Resiko</p>
Penetapan Konteks IKU Risiko Strategis Pemda	<p>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah</p> <p>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah adalah suatu perhitungan nilai dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah</p>
	<p>Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Setiap Tahun</p> <p>Opini BPK terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tiap Tahun merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang berdasarkan Audit BPK atas LKPD tahunan</p>
	<p>Indeks Manajemen Resiko</p> <p>Indeks Manajemen Risiko merupakan Index yang digunakan untuk mengukur efektivitas Manajemen Risiko di suatu pemerintahan daerah berdasarkan kemampuannya untuk mencapai tujuan terkait dengan Strategi, Operasional, Pelaporan, dan Kepatuhan.</p>
Prioritas Pembangunan dan Program Unggulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 2. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Urusan Pemerintahan Daerah	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1. BAPPEDA 2. INSPEKTORAT 3. BAPENDA 4. BPKAD
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan: 4.1 Meningkatkan Reformasi Birokrasi Sasaran : 4.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah IKU Sasaran : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Setiap Tahun Indeks Manajemen Resiko Program : 1. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
<div style="text-align: right;"> <p>Dumai, 10 Juli 2023 Kepala Bappeda</p>  <p>Drs. BUDHI HASNUL, M.Si NIP. 19740213 199303 1 002</p> </div>	

Form 5
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Dumai	
Tahun Penilaian	:	2024	
Periode yang dinilai	:	Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	:	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
OPD yang dinilai	:	Bappeda Kota Dumai	
Sumber data	:	Renstra Bappeda Kota Dumai Tahun 2021-2026	
Tujuan Strategis	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai		
Sasaran Strategis	1.	Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional	
IKU Renstra OPD	IKU		2026
	1.	INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (IPPEN) PEMDA (Konteks : untuk mengukur kualitas perencanaan daerah yang terdiri dari komponen sinergi perencanaan, kualitas perencanaan dan keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja)	100
	2.	Keselarasn dokumen RPJMD Kota Dumai dengan dokumen RPJMN (Komponen Sinergi)	9
	3.	Keselarasn dokumen RKP Kota Dumai dengan dokumen RKP (Komponen Sinergi)	13
	4.	Kesesuaian APBD Kota Dumai membiayai program prioritas Nasional dalam RKP (Komponen Sinergi)	10
	5.	Kesesuaian antara Isu Strategis-Target dengan Program/Kegiatan/ Proyek di RPJMD Kota Dumai atau RKP (Komponen Kualitas)	49
	6.	Inovasi perencanaan pembangunan (Konteks Kualitas)	9
	7.	Target dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran OPD terkait (Komponen keterhubungan renbang dan renkin)	10
Program	1.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis:		
		Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai	
	Sasaran Strategis:		
		Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional	
	IKU Strategis:		
		Keselarasn dokumen RPJMD Kota Dumai dengan dokumen RPJMN (Komponen Sinergi)	9
		Keselarasn dokumen RKP Kota Dumai dengan dokumen RKP (Komponen Sinergi)	13
		Kesesuaian APBD Kota Dumai membiayai program prioritas Nasional dalam RKP (Komponen Sinergi)	10
		Target dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran OPD terkait (Komponen keterhubungan renbang dan renkin)	10

	Program :	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
<p>Dumai, Kantor Wali Kota Dumai Kantor Bappeda</p>  <p>Drs. BUDHI HASNUL, M.Si NIP. 19740213 199303 1 002</p>		

Form 6
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	Pemerintah Kota Dumai	
Tahun Penilaian	2024	
Periode yang dinilai	Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
OPD yang dinilai	Bappeda Kota Dumai	
Sumber data	Renstra Bappeda Kota Dumai Tahun 2021-2026	
Tujuan Strategis	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai	
Sasaran Strategis	1 Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional	
Program (Renja 2024)	1. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 2. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
Keluaran / Hasil Kegiatan	IKU	2024
	1. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	4 dokumen
	2. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2 dokumen
	3. Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang urusan perencanaan	1 Dokumen
	4. Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	8 dokumen
	5. Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	8 dokumen
	6. Jumlah dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan kewilayahan	8 dokumen
Program, Kegiatan/Sub Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan/Sub Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program: PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</p> <p>Kegiatan: 1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</p> <p>Sub Kegiatan: 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 2 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 3 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 6 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 7 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 9 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 10 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 11 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 12 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan: 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p>	

	<p>2 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan</p> <p>3 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>4 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia</p> <p>5 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>6 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian</p> <p>7 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>8 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA</p> <p>9 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>10 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur</p> <p>11 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>12 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan</p>
--	--



 Dumai,
 19 Mei 2022
 Kepala Bappeda
 Drs. BUDI HASNUL, M.Si
 NIP. 197402111993031002

KERTAS KERJA
IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Nama Pemda : Pemerintah Kota Dumai
 Nama OPD : Bappeda Kota Dumai
 Tahun Penilaian : 2024
 Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2021-2026
 Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

No	Tujuan/ Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Eksternal/ Internal)		Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan Strategis: Meningkatkan Reformasi Birokrasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Rendahnya kualitas dokumen perencanaan	RSP.24.36.01.51	Walikota Dumai	1. Kualitas sumber daya aparatur yang menyusun perencanaan belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan (pengangkatan dan penempatan pejabat struktural dan fungsional di Bappedalitbang merupakan kewenangan dari Tim Baperjajak dan Kepala Daerah 2. Kebijakan pemerintah pusat yang sebelumnya tidak ada di dokumen pusat namun muncul sebagai respon atas suatu kejadian/kondisi diluar kebiasaan yang mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian-penyesuaian ketika menyusun dokumen perencanaan tahunan daerah	Internal	C UC	1. Kurangnya nilai unsur perencanaan pada penilaian SAKIP 2. Tidak konsistennya dokumen perencanaan tahunan yang mengakomodir kebijakan pusat yang baru sebagai mandat yang harus dilaksanakan dengan penjabaran dokumen RPJMD	Pemerintah Kota Dumai

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Eksternal/Internal)		Uraian	Pihak yang terkena
a	Program: PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	c	d	e	f	g	h	i	j	k
			Keterlambatan penetapan RKPD	RSP.24.36.01.52	Walikota Dumai	1. Terlambatnya penerbitan pedoman penyusunan RKPD oleh Kemendagri 2. Proses fasilitasi RKPD di Provinsi terlambat	Eksternal	UC	Keterlambatan proses lanapan APBD	Pemerintah Kota Dumai
			Cascading eselon 2 belum mendukung pemda secara komprehensif dst.	RSP.24.36.01.53	Walikota Dumai	Kurangnya komitmen pimpinan Eselon 2 dan pembekalan manajemen kinerja bagi eselon 2	Internal	C	Rendahnya pencapaian target tujuan dan sasaran RPJMD	Walikota



Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan tujuan strategis sebagaimana tercantum dalam RPJMD
- Kolom c diisi dengan indikator kinerja sasaran strategis
- Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
- Kolom e diisi dengan kode risiko
- Kolom f diisi dengan pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko
- Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : **Man, Money, Method, Machine, dan Material**
- Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
- Kolom i diisi dengan C jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
- Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: **Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum**
- Kolom k diisi dengan pihak/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

KERTAS KERJA
IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kota Dumai
 Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai
 Tahun Penilaian : 2024
 Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2021-2026
 Urusan Pemerintah : Unsur Penunjang Urusan Pemerintah (Perencanaan)
 Tujuan Strategis : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		CUC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian		Sumber (Eksternal/ Internal)	Uraian
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k
	<p>Tujuan OPD: Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai</p> <p>Sasaran OPD: Tercapainya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional</p>	<p>1. INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (IPPN) PEMDA (Konteks : untuk mengukur kualitas perencanaan daerah yang terdiri dari komponen sinergi perencanaan, kualitas perencanaan dan keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja)</p> <p>2. Keselarasan dokumen RPJMD Kota Dumai dengan dokumen RPJMN (Komponen Sinergi)</p> <p>3. Keselarasan dokumen RKPD Kota Dumai dengan dokumen RKP (Komponen Sinergi)</p> <p>4. Kesesuaian APBD Kota Dumai membiayai program prioritas Nasional dalam RKPD (Komponen Sinergi)</p> <p>5. Kesesuaian antara Isu Strategis-Target dengan Program/Kegiatan/ Proyek di RPJMD Kota Dumai atau RKPD (Komponen Kualitas)</p> <p>6. Inovasi perencanaan pembangunan (Konteks Kualitas)</p> <p>7. Target dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran OPD terkait (Komponen keterhubungan renbang dan renkin)</p>							

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Eksternal/Internal)		Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Program: PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	Dokumen perencanaan perangkat daerah tidak sinkron	RSO.24.36.28.01	Kepala Bappeda	Kurang konsistennya Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan	Eksternal	C	Penyusunan dokumen Perencanaan tidak sesuai jadwal	Bappeda
		2. Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Penyampaian dokumen perencanaan ke Provinsi tidak tepat waktu	RSO.24.36.28.02	Kepala Bappeda	1. Keterlambatan Perangkat Daerah menyampaikan data; 2. Belum tersedianya regulasi yang mengatur terkait sanksi bagi Perangkat Daerah yang terlambat 3. Belum memiliki database time series yang tersimpan kedalam sistem e-planning (Sebelum ada SIPD)	Eksternal Internal Eksternal		Jadwal penyusunan penganggaran menjadi terhambat	Pemerintah Kota Dumai



Dumai,
Pemilik Risiko :
1. ARIKE TRESMITA, S.Pi, M.Si
NIP.19770405 200112 2 003
2. INSANI TAQWA SAILLST
NIP.19870929 201001 1 008

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan tujuan sebagaimana tercantum dalam Renstra
- Kolom c diisi dengan indikator kinerja utama
- Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
- Kolom e diisi dengan kode risiko
- Kolom f diisi dengan pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
- Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : **Man, Money, Method, Machine, dan Material**
- Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
- Kolom i diisi dengan **C jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko**, atau **UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko**
- Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam : **Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum**
- Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

KERTAS KERJA
IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kota Dumai
 Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai
 Tahun Penilaian : 2024
 Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2021-2026
 Urusan Pemerintahan : Unsur Penunjang Urusan Pemerintah (Perencanaan)
 Tujuan Strategis : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai
 Sasaran Strategis : Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko Operasional/Risiko Fraud/Risiko Kemitraan				Sebab			Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Eksternal/ Internal)	CRJC	Uraian	Risiko yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Program: PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH										
	Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia										
	Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RPKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RPKPD)	Perencanaan	Tidak sinkronnya Dokumen Renja OPD (bid. pemerintahan) dengan dokumen RPKD Kota Dumai	ROO.24.36.28.01.KM	Kepala Bidang PPM	Dalam penyusunan Renja OPD belum mempedomani peraturan yang berlaku	Internal dan Eksternal	C	terlambatnya jadwal dan proses perencanaan pembangunan daerah	Pemerintah Kota Dumai
			Pelaksanaan	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJMD/RPKD) bidang Pemerintahan	ROO.24.36.28.02.KM	Kepala Bidang PPM	lemahnya koordinasi antara bidang mitra Bappedalitbang dengan masing-masing OPD mitranya	Internal dan Eksternal	C	terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD/RPJMD/RPKD) sesuai peraturan yang berlaku	Pemerintah Kota Dumai

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko Operasional/Risiko Fraud/Risiko Kemitraan				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Eksternal/ Internal)		Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
Sub Kegiatan: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah			Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (bid. pemerintahan) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.24.36.28.03.KM	Kepala Bidang PPM	keterbatasan anggaran dan ketidak sesuai usulan dengan prioritas pembangunan daerah	Internal dan Eksternal	UC	tidak terlaksananya beberapa pembangunan sesuai usulan masyarakat yang menyebabkan menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah	Pemerintah Kota Dumai dan Stakeholder pembangunan
		Pemantauan dan evaluasi	Hasil Evaluasi/rekomendasi tidak ditindaklanjuti	ROO.24.36.28.04.KM	Kepala Bidang PPM	Pada saat pembahasan dengan PD hanya dihadiri oleh staf	Eksternal	C	tidak tersampainya informasi ke pejabat di PD	Stakeholder	
		Pelaporan dan pertanggung jawaban									
		Perencanaan	Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah (bid. pemerintahan) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.24.36.28.05.KM	Kepala Bidang PPM	Dalam menyusun Renja OPD masih ada yang belum berpedoman pada RKPd	internal	C	Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPd Kota Dumai	Bappeda dan Pemerintah Kota Dumai	
		Pelaksanaan	Kurang seriusnya OPD (bid. Pemerintahan) dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	ROO.24.36.28.06.KM	Kepala Bidang PPM	Keterbatasan kemampuan SDM yang menangani perencanaan di OPD	Eksternal	C	Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPd Kota Dumai	Bappeda dan Pemerintah Kota Dumai	
		Pemantauan dan evaluasi									
		Pelaporan dan pertanggung jawaban									
Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan		Perencanaan	Data (bid. Pemerintahan) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey;	ROO.24.36.28.07	Kepala Bidang PPM	Sumber data yang tidak valid dan kesalahan SDM dalam merekapnya	internal dan eksternal	C	Menghambat pelaksanaan survey	Bappeda

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko Operasional/Risiko Fraud/Risiko Kemitraan				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Eksternal/ internal)		Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
		pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	Pelaksanaan	Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan di OPD (bid. Pemerintahan)	ROO.24.36.28.08.KM	Kepala Bidang PPM	kurangnya koordinasi dengan mitra bidang pemerintahan	internal dan eksternal	C	Hasil survey yang tidak sesuai dengan yang direncanakan	Bappeda
			Pemantauan dan evaluasi								
			Pelaporan dan pertanggung jawaban								
	Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pemerintahan	Perencanaan	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. Pemerintahan) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.24.36.28.09.KM	Kepala Bidang PPM	Dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan belum berpedoman pada perencanaan propinsi dan nasional	internal dan eksternal	C	Tidak diakomodirnya usulan pemerintah Kota Dumai oleh pemerintah Propinsi/Nasional	Pemerintah Kota Dumai
			Pelaksanaan	Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. Pemerintahan) propinsi/nasional yang berlokasi di Kota Dumai	ROO.24.36.28.10.KM	Kepala Bidang PPM	Kurangnya koordinasi pemerintah Kota Dumai dengan pemerintah Propinsi/Pusat	internal dan eksternal	C	Tertambatnya perkembangan pembangunan di Kota Dumai	Pemerintah Kota Dumai
			Pemantauan dan evaluasi	Hasil Evaluasi/rekomendasi tidak ditindaklanjuti	ROO.24.36.28.11.KM	Kepala Bidang PPM	Pada saat pembahasan dengan PD hanya dihadiri oleh staf	eksternal	C	Tidak tersampainya informasi ke pejabat di PD	Stakeholder
			Pelaporan dan pertanggung jawaban								
	Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia yang	Perencanaan	Tidak sinkronnya Dokumen Renja OPD (bid. pembangunan manusia) dengan dokumen RKPD Kota Dumai	ROO.24.36.28.12.KM	Kepala Bidang PPM	Dalam penyusunan Renja OPD belum mempedomani peraturan yang berlaku	internal dan eksternal	C	Terhambatnya jadwal dan proses perencanaan pembangunan daerah	Pemerintah Kota Dumai

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko Operasional/Risiko Fraud/Risiko Kemitraan				Sebab			C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Eksternal/Internal)	Uraian		Pihak yang terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
		dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Pelaksanaan	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJMD/RKPD) bidang pembangunan manusia	ROO.24.36.28.13 KM	Kepala Bidang PPM	Lemahnya koordinasi antara bidang mitra Bappedalitbang dengan masing-masing OPD mitranya	internal dan eksternal	C	Terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD/RPJMD/RKPD) sesuai peraturan yang berlaku	Pemerintah Kota Dumai	
				Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (bid. pembangunan manusia) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.24.36.28.14.KM	Kepala Bidang PPM	Keterbatasan anggaran dan ketidak sesuai usulan dengan prioritas pembangunan daerah	internal dan eksternal	UC	Tidak terlaksananya beberapa pembangunan sesuai usulan masyarakat yang menyebabkan menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah	Pemerintah Kota Dumai dan Stake holder Pembangunan	
			Pemantauan dan evaluasi									
			Pelaporan dan pertanggung jawaban									
	Sub Kegiatan: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah	Perencanaan	Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah (bid. pembangunan manusia) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.24.36.28.15.KM	Kepala Bidang PPM	Dalam menyusun Renja OPD masih ada yang belum berpedoman pada RKPD	internal dan eksternal	C	Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPD Kota Dumai	Bappeda dan Pemerintah Kota Dumai	
			Pelaksanaan	Kurang seriusnya OPD (bid. pembangunan manusia) dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	ROO.24.36.28.16 KM	Kepala Bidang PPM	Keterbatasan kemampuan SDM yang menangani perencanaan di OPD	eksternal	C	Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPD Kota Dumai	Bappeda dan Pemerintah Kota Dumai	
			Pemantauan dan evaluasi									
			Pelaporan dan pertanggung jawaban									

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko Operasional/Risiko Fraud/Risiko Kemitraan				Sebab		C/UC	Dampak		
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Eksternal/Internal)		Uraian	Pihak yang terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang pembangunan manusia	Perencanaan	Data (bid. pembangunan manusia) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey;	ROO.24.36.28.17	Kepala Bidang PPM	Sumber data yang tidak valid dan kesalahan SDM dalam merekapnya	internal dan eksternal	C	Menghambat pelaksanaan survey	Bappeda	
			Pelaksanaan	Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan di OPD (bid. pembangunan manusia)	ROO.24.36.2818.KM	Kepala Bidang PPM	Kurangnya koordinasi dengan mitra bidang pemerintahan	internal dan eksternal	C	Hasil survey yang tidak sesuai dengan yang direncanakan	Bappeda	
			Pemantauan dan evaluasi									
			Pelaporan dan pertanggung jawaban									
	Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pemerintahan	Perencanaan	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. pembangunan manusia) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.24.36.28.19.KM	Kepala Bidang PPM	Dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan belum berpedoman pada perencanaan propinsi dan nasional	internal dan eksternal	C	Tidak diakomodirnya usulan pemerintah Kota Dumai oleh pemerintah Propinsi/Nasional	Pemerintah Kota Dumai	
			Pelaksanaan	Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. pembangunan manusia) propinsi/nasional yang berlokasi di Kota Dumai	ROO.24.36.28.20.KM	Kepala Bidang PPM	Kurangnya koordinasi pemerintah Kota Dumai dengan pemerintah Propinsi/Pusat	internal dan eksternal	C	Tertambatnya perkembangan pembangunan di Kota Dumai	Pemerintah Kota Dumai	
			Pemantauan dan evaluasi									

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko Operasional/Risiko Fraud/Risiko Kemitraan				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Eksternal/ Internal)		Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	t
			Pelaporan dan pertanggung jawaban								
	Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)										
	Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Perencanaan	Tidak sinkronnya Dokumen Renja OPD (bid. perekonomian) dengan dokumen RKPD Kota Dumai	ROO.24.36.28.21.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Dalam penyusunan Renja OPD belum mempedomani peraturan yang berlaku	Internal dan Eksternal	C	terhambatnya jadwal dan proses perencanaan pembangunan daerah	Pemerintah Kota Dumai
			Pelaksanaan	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJMD/RKPD) bidang perekonomian	ROO.24.36.28.22.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Lemahnya koordinasi antara bidang mitra Bappedalitbang dengan masing-masing OPD mitranya	Internal dan Eksternal	C	terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD/RPJMD/RKPD) sesuai peraturan yang berlaku	Pemerintah Kota Dumai
				Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (bid. perekonomian) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.24.36.28.23.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Keterbatasan anggaran dan ketidak sesuai usulan dengan prioritas pembangunan daerah	Internal dan Eksternal	UC	tidak terlaksananya beberapa pembangunan sesuai usulan masyarakat yang menyebabkan menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah	Pemerintah Kota Dumai dan Stakeholder pembangunan
			Pemantauan dan evaluasi	Proses pencairan yang	ROO.24.36.28.24	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	SDM yang bersangkutan lama	internal	C	Proses pencairan yang lambat	Pemerintah Kota
			Pelaporan dan pertanggung jawaban								
	Sub Kegiatan:										

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko Operasional/Risiko Fraud/Risiko Kemitraan				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Eksternal/ Internal)		Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah	Perencanaan	Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah (bid. perekonomian) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.24.36.28.25 KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Dalam menyusun Renja OPD masih ada yang belum berpedoman pada RKPD	internal dan eksternal	C	Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPD Kota Dumai	Bappeda dan Pemerintah Kota Dumai
			Pelaksanaan	Kurang seriusnya OPD (bid. perekonomian) dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	ROO.24.36.28.26 KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	keterbatasan kemampuan SDM yang menangani perencanaan di OPD	eksternal	C	Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPD Kota Dumai	Bappeda dan Pemerintah Kota Dumai
			Pemantauan dan evaluasi	Proses pencairan yang lambat diakibatkan tidak	ROO.24.36.28.27	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan	SDM yang bersangkutan lama menyerahkan berkas	internal	C	Proses pencairan yang lambat dan menumpuk	Pemerintah Kota Dumai
			Pelaporan dan pertanggung jawaban								
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang perekonomian	Perencanaan	Data (bid. perekonomian) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey;	ROO.24.36.28.28 KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Sumber data yang tidak valid dan kesalahan SDM dalam merekapnya	internal dan eksternal	C	menghambat pelaksanaan survey	Bappeda
			Pelaksanaan	Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan di OPD (bid. perekonomian)	ROO.24.36.28.29 KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Kurangnya koordinasi dengan mitra bidang pemerintahan	internal dan eksternal	C	hasil survey yang tidak sesuai dengan yang direncanakan	Bappeda
			Pemantauan dan evaluasi	Proses pencairan yang lambat diakibatkan tidak lengkapnya berkas administrasi	ROO.24.36.28.30	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	SDM yang bersangkutan lama menyerahkan berkas administrasi ke bendahara bidang	internal	C	Proses pencairan yang lambat dan menumpuk	Pemerintah Kota Dumai
				Penyelesaian laporan monitoring yang lama	ROO.24.36.28.31	Kepala Bidang Perekonomian, SDA,	Pengerjaan laporan monitoring tidak dilakukan bersama tim	internal	C	Proses pengarsipan bermasalah	Pemerintah Kota Dumai
			Pelaporan dan pertanggung jawaban								

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko Operasional/Risiko Fraud/Risiko Kemitraan				Sebab			C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Eksternal/ Internal)	Uraian		Pihak yang terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
	Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang perekonomian	Perencanaan	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. perekonomian) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.24.36.28.32.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Wilayah	Dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan belum berpedoman pada perencanaan propinsi dan nasional	internal dan eksternal	C	tidak diakomodirnya usulan pemerintah Kota Dumai oleh pemerintah Propinsi/Nasional	Pemerintah Kota Dumai	
			Pelaksanaan	Tidak adanya prioritas	ROO.24.36.28.33.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Wilayah	Kurangnya koordinasi	internal	C	terlambatnya perkembangan pembangunan di Kota Dumai	Pemerintah Kota Dumai	
			Pemantauan dan evaluasi	Proses pencairan yang lambat diakibatkan tidak lengkapnya berkas administrasi	ROO.24.36.28.34	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Wilayah	SDM yang bersangkutan lama menyerahkan berkas administrasi ke bendahara bidang	internal	C	Proses pencairan yang lambat dan menumpuk	Pemerintah Kota Dumai	
			Pelaporan dan pertanggung jawaban									
	Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Perencanaan	Tidak sinkronnya Dokumen Renja OPD (bid. SDA) dengan dokumen RKPD Kota Dumai	ROO.24.36.28.35.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Wilayah	Dalam penyusunan Renja OPD belum mempedomani peraturan yang berlaku	internal dan eksternal	C	terhambatnya jadwal dan proses perencanaan pembangunan daerah	Pemerintah Kota Dumai	
			Pelaksanaan	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJMD/RKPD) bidang SDA	ROO.24.36.28.36.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Wilayah	lemahnya koordinasi antara bidang mitra Bappedalitbang dengan masing-masing OPD mitranya	internal dan eksternal	C	terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD/RPJMD/RKPD) sesuai peraturan yang berlaku	Pemerintah Kota Dumai	

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko Operasional/Risiko Fraud/Risiko Kemitraan				Sebab		C/A/C	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Eksternal/Internal)		Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (bid. SDA) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.24.36.28.37.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	keterbatasan anggaran dan ketidak sesuai usulan dengan prioritas pembangunan daerah	internal dan eksternal	UC	tidak terlaksananya beberapa pembangunan sesuai usulan masyarakat yang menyebabkan menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah	Pemko Dumai dan Stake Holder Pembangunan
			Pemantauan dan evaluasi	Proses pencairan yang lambat diakibatkan tidak lengkapnya berkas administrasi	ROO.24.36.28.38	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	SDM yang bersangkutan lama menyerahkan berkas administrasi ke bendahara bidang	internal	C	Proses pencairan yang lambat dan menumpuk	Pemerintah Kota Dumai
			Pelaporan dan pertanggung jawaban								
	Sub Kegiatan: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah	Perencanaan	Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah (bid. SDA) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.24.36.28.39.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Dalam menyusun Renja OPD masih ada yang belum berpedoman pada RKPD	internal dan eksternal	C	Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPD Kota Dumai	Bappeda dan Pemerintah Kota Dumai
			Pelaksanaan	Kurang seriusnya OPD (bid. SDA) dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	ROO.24.36.28.40.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Keterbatasan kemampuan SDM yang menangani perencanaan di OPD	eksternal	C	Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPD Kota Dumai	Bappeda dan Pemerintah Kota Dumai
			Pemantauan dan evaluasi	Proses pencairan yang lambat diakibatkan tidak lengkapnya berkas administrasi	ROO.24.36.28.41	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	SDM yang bersangkutan lama menyerahkan berkas administrasi ke bendahara bidang	internal	C	Proses pencairan yang lambat dan menumpuk	Pemerintah Kota Dumai
			Pelaporan dan pertanggung jawaban								

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko Operasional/Risiko Fraud/Risiko Kemitraan				Sebab			CUC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Eksternal/Internal)	Uraian		Pihak yang terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang SDA	Perencanaan	Data (bid. SDA) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey;	ROO.24.36.28.42.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Sumber data yang tidak valid dan kesalahan SDM dalam merekapnya	internal dan eksternal	C	menghambat pelaksanaan survey	Bappeda		
		Pelaksanaan	Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan di OPD (bid. SDA)	ROO.24.36.28.43.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	kurangnya koordinasi dengan mitra bidang pemerintahan	internal dan eksternal	C	hasil survey yang tidak sesuai dengan yang direncanakan	Bappeda		
		Pemantauan dan evaluasi	Proses pencairan yang lambat diakibatkan tidak lengkapnya berkas administrasi	ROO.24.36.28.44	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	SDM yang bersangkutan lama menyerahkan berkas administrasi ke bendahara bidang	internal	C	Proses pencairan yang lambat dan menumpuk	Pemerintah Kota Dumai		
			Penyelesaian laporan monitoring yang lama	ROO.24.36.28.45	Kepala Bidang	Pengerjaan laporan monitoring tidak dilakukan bersama tim	internal	C	Proses pengarsipan bermasalah	Pemerintah Kota		
		Pelaporan dan pertanggung jawaban										
Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Perencanaan	Tidak sinkronnya Dokumen Renja OPD (bid. Infrastruktur) dengan dokumen RKPD Kota Dumai	ROO.24.36.28.46.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Dalam penyusunan Renja OPD belum mempedomani peraturan yang berlaku	Internal	C	terhambatnya jadwal dan proses perencanaan pembangunan daerah	Pemerintah Kota		
Pelaksanaan		Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJMD/RKPD) bidang Infrastruktur	ROO.24.36.28.47.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	lemahnya koordinasi antara bidang mitra Bappedalitbang dengan masing-masing OPD mitranya	Internal dan Eksternal	C	terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD/RPJMD/RKPD) sesuai peraturan yang berlaku	Pemerintah Kota Dumai			

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko Operasional/Risiko Fraud/Risiko Kemitraan				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Eksternal/ Internal)		Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
Sub Kegiatan: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (bid. Infrastruktur) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.24.36.28.48.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	keterbatasan anggaran dan ketidak sesuai usulan dengan prioritas pembangunan daerah	Internal dan Eksternal	C	tidak terlaksananya beberapa pembangunan sesuai usulan masyarakat yang menyebabkan menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah	Pemerintah Kota Dumai dan Stakeholder pembangunan
			Pemantauan dan evaluasi	Masih terdapatnya perangkat	ROO.24.36.28.49.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	perangkat daerah belum	eksternal	C	tidak dapat merencanakan	Pemerintah Kota
			Pelaporan dan pertanggung jawaban								
		Jumlah perangkat daerah yang dilakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah	Perencanaan	Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah (bid. Infrastruktur) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.24.36.28.50.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Dalam menyusun Renja OPD masih ada yang belum berpedoman pada RKPD	internal dan eksternal	C	Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPD Kota Dumai	Bappeda dan Pemerintah Kota Dumai
			Pelaksanaan	Kurang seriusnya OPD (bid. Infrastruktur) dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	ROO.24.36.28.51.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Keterbatasan kemampuan SDM yang menangani perencanaan di OPD	Eksternal	C	Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPD Kota Dumai	Bappeda dan Pemerintah Kota Dumai
			Pemantauan dan evaluasi	Belum maksimalnya kegiatan asistensi terhadap Perangkat Daerah mitra bidang infrastruktur	ROO.24.36.28.52.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Keterbatasan SDM dalam pemahaman proses bisnis perencanaan	internal	C	Tidak optimalnya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang infrastruktur	Bappeda
			Pelaporan dan pertanggung jawaban								

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko Operasional/Risiko Fraud/Risiko Kemitraan				Sebab			C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Eksternal/ Internal)	Uraian		Pihak yang terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
a	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang Infrastruktur	Perencanaan	Data (bid. Infrastruktur) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey;	ROO.24.36.28.53.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Sumber data yang tidak valid dan kesalahan SDM dalam merekapnya	internal dan eksternal	C	menghambat pelaksanaan survey	Bappeda	
			Pelaksanaan	Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan di OPD (bid. Infrastruktur)	ROO.24.36.28.54.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	kurangnya koordinasi dengan mitra bidang pemerintahan	internal dan eksternal	C	hasil survey yang tidak sesuai dengan yang direncanakan	Bappeda	
				Tidak tersedianya data pelaksanaan pekerjaan oleh perangkat daerah	ROO.24.36.28.55		Perangkat daerah belum melaksanakan pekerjaan pada tenggat waktu tertentu (Triwulan tertentu)	internal dan eksternal	C	hasil monitoring dan evaluasi tidak optimal	Bappeda	
			Pemantauan dan evaluasi	Double pencairan perjalanan dinas dalam kota dalam rangka monitoring dengan perjalanan dinas dalam rangka penugasan lainnya di waktu yang bersamaan.	ROO.24.36.28.56	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	ketidakteelitian dalam pengajuan pencairan	internal	C	pencairan tidak sesuai ketentuan sehingga perlu dilakukan pengembalian ke kas negara	Bappeda	
			Pelaporan dan pertanggung jawaban									
a	Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/RPJMD pada bidang Infrastruktur	Perencanaan	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. Infrastruktur) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.24.36.28.57.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan belum berpedoman pada perencanaan propinsi dan nasional	internal dan eksternal	C	tidak diakomodirnya usulan pemerintah Kota Dumai oleh pemerintah Propinsi/Nasional	Pemerintah Kota Dumai	
			Pelaksanaan	Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. Infrastruktur) propinsi/nasional yang berlokasi di Kota Dumai	ROO.24.36.28.58.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Kurangnya koordinasi pemerintah Kota Dumai dengan pemerintah Propinsi/Pusat	internal dan eksternal	C	terlambatnya perkembangan pembangunan di Kota Dumai	Pemerintah Kota Dumai	

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko Operasional/Risiko Fraud/Risiko Kemitraan				Sebab		C/A/C	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Eksternal/Internal)		Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
			Pemantauan dan evaluasi	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. Kewilayahan) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.24.36.28.59.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Perubahan standar harga satuan	eksternal	C	Belum konsistennya dokumen Renstra/renja dengan RKPD/RPJMD	Pemerintah Kota Dumai
			Pelaporan dan pertanggung jawaban								
	Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Perencanaan	Tidak sinkronnya Dokumen Renja OPD (bid. Kewilayahan) dengan dokumen RKPD Kota Dumai	ROO.24.36.28.60.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Dalam penyusunan Renja OPD belum mempedomani peraturan yang berlaku	internal dan eksternal	C	terhambatnya jadwal dan proses perencanaan pembangunan daerah	Pemko Dumai
			Pelaksanaan	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD/RPJMD/RKPD) bidang Kewilayahan	ROO.24.36.28.61.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	lemahnya koordinasi antara bidang mitra Bappedalitbang dengan masing-masing OPD mitranya	internal dan eksternal	C	terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD/RPJMD/RKPD) sesuai peraturan yang berlaku	Pemko Dumai
				Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (bid. Kewilayahan) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.24.36.28.62.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	keterbatasan anggaran dan ketidak sesuai usulan dengan prioritas pembangunan daerah	internal dan eksternal	C	tidak terlaksananya beberapa pembangunan sesuai usulan masyarakat yang menyebabkan menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah	Pemko Dumai dan Stake Holder Pembangunan
			Pemantauan dan evaluasi	Terdapat perangkat daerah yang tidak menyampaikan data capaian pembangunan di mitra bidang kewilayahan	ROO.24.36.28.63.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	perangkat daerah belum mampu menyediakan data sesuai kemampuan	internal dan eksternal	C	tidak dapat merencanakan sesuai dengan kebutuhan yang tepat sasaran	Pemerintah Kota Dumai
			Pelaporan dan pertanggung jawaban								
	Sub Kegiatan: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah bidang Kewilayahan yang dilakukan	Perencanaan	Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah (bid. Kewilayahan) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.24.36.28.64.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Dalam menyusun Renja OPD masih ada yang belum berpedoman pada RKPD	internal dan eksternal	C	Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPD Kota Dumai	Bappeda dan Pemerintah Kota Dumai

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko Operasional/Risiko Fraud/Risiko Kemitraan				Sebab			C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Eksternal/Internal)	Uraian		Pihak yang terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
		asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah	Pelaksanaan	Kurang seriusnya OPD (bid. Kewilayahan) dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	ROO.24.36.28.65.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	keterbatasan kemampuan SDM yang menangani perencanaan di OPD	Eksternal	C	Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPD Kota Dumai	Bappeda dan Pemerintah Kota Dumai	
			Pemantauan dan evaluasi	Belum maksimalnya kegiatan asistensi terhadap Perangkat Daerah mitra bidang kewilayahan	ROO.24.36.28.66.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	keterbatasan SDM dalam pemahaman proses bisnis perencanaan	Internal	C	Tidak optimalnya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang infrastruktur	Bappeda	
			Pelaporan dan pertanggung jawaban									
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang Kewilayahan	Perencanaan	Data (bid. Kewilayahan) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey;	ROO.24.36.28.67.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Sumber data yang tidak valid dan kesalahan SDM dalam merekapnya	internal dan eksternal	C	menghambat pelaksanaan survey	Bappeda	
			Pelaksanaan	Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan di OPD (bid. Kewilayahan)	ROO.24.36.28.68.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	kurangnya koordinasi dengan mitra bidang pemerintahan	internal dan eksternal	C	hasil survey yang tidak sesuai dengan yang direncanakan	Bappeda	
				Tidak tersedianya data pelaksanaan pekerjaan oleh perangkat daerah bid. Kewilayahan	ROO.24.36.28.69	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Perangkat daerah belum melaksanakan pekerjaan pada tenggat waktu tertentu (Triwulan tertentu)	internal dan eksternal	C	hasil monitoring dan evaluasi tidak optimal	Bappeda	
			Pemantauan dan evaluasi	Double pencairan perjalanan dinas dalam kota dalam rangka monitoring dengan perjalanan dinas dalam rangka penugasan lainnya di waktu yang bersamaan.	ROO.24.36.28.70	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	ketidaktelitian dalam pengajuan pencairan	internal	C	pencairan tidak sesuai ketentuan sehingga perlu dilakukan pengembalian ke kas negara	Bappeda	
			Pelaporan dan pertanggung jawaban									

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko Operasional/Risiko Fraud/Risiko Kemitraan				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Eksternal/ internal)		Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Kewilayahan	Perencanaan	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. Kewilayahan) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.24.36.28.71.KM	Kepala Dinas / Kabid terkait	Dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan belum berpedoman pada perencanaan propinsi dan nasional	internal dan eksternal	C	tidak diakomodirnya usulan pemerintah Kota Dumai oleh pemerintah Propinsi/Nasional	
			Pelaksanaan	Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. Kewilayahan) propinsi/nasional yang berlokasi di Kota Dumai	ROO.24.36.28.72.KM	Kepala Dinas / Kabid terkait	Kurangnya koordinasi pemerintah Kota Dumai dengan pemerintah Propinsi/Pusat	internal dan eksternal	C	terlambatnya perkembangan pembangunan di Kota Dumai	
			Pemantauan dan evaluasi	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. Kewilayahan) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.24.36.28.73.KM	Kepala Dinas / Kabid terkait	Perubahan standar harga satuan	eksternal	UC	Belum konsistennya dokumen Renstra/renja dengan RKPD/RPJMD	
			Pelaporan dan pertanggung jawaban								



Dumai,
Pemilik Risiko :
1. ARIKE TRESMITA, S.Pt, M.Si
NIP.19770405 200112 2 003
2. INSANI TAQWA SAILI,ST
NIP 19870929 201001 1 006

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan tujuan sebagaimana tercantum dalam Renstra
- Kolom c diisi dengan indikator kinerja kegiatan
- Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan
- Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
- Kolom f diisi dengan kode risiko
- Kolom g diisi dengan pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
- Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : **Man, Money, Method, Machine, dan Material**
- Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
- Kolom j diisi dengan C jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
- Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: **Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum**
- Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

**KERTAS KERJA
HASIL ANALISIS RISIKO**

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Dumai				
Tahun Penilaian	: 2024				
Tujuan Strategis	: Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai				
Urusan Pemerintahan	: Unsur Penunjang Urusan Pemerintah (Perencanaan)				

No.	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f
I. Risiko Strategis Pemda					
1.	Rendahnya kualitas dokumen perencanaan	RSP.24.36.01.51	4	4	19
2.	Keterlambatan penetapan RKPD	RSP.24.36.01.52	3	4	16
3.	Cascading eselon 2 belum mendukung pemda secara komprehensif	RSP.24.36.01.53	4	3	17
II. Risiko Strategis OPD					
1.	Dokumen perencanaan perangkat daerah tidak sinkron	RSO.24.36.28.01	3	4	16
2.	Penyampaian dokumen perencanaan ke Provinsi tidak tepat waktu	RSO.24.36.28.02	3	3	14
III. Risiko Operasional OPD					
1.	Tidak sinkronnya Dokumen Renja OPD (bid. pemerintahan) dengan dokumen RKPD Kota Dumai	ROO.24.36.28.01.KM	3	2	11
2.	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJMD/RKPD) bidang Pemerintahan	ROO.24.36.28.02.KM	3	2	11
3.	Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (bid. pemerintahan) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.24.36.28.03.KM	3	2	11
4.	Hasil Evaluasi/rekomendasi tidak ditindaklanjuti	ROO.24.36.28.04.KM	3	4	16
5.	Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah (bid. pemerintahan) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.24.36.28.05.KM	3	2	11
6.	Kurang seriusnya OPD (bid. Pemerintahan) dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	ROO.24.36.28.06.KM	2	1	3
7.	Data (bid. Pemerintahan) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey;	ROO.24.36.28.07	3	2	11
8.	Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan di OPD (bid. Pemerintahan)	ROO.24.36.28.08.KM	2	3	10

No.	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f
9.	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. Pemerintahan) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.24.36.28.09.KM	3	2	11
10.	Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. Pemerintahan) propinsi/nasional yang berlokasi di Kota Dumai	ROO.24.36.28.10.KM	3	2	11
11.	Hasil Evaluasi/rekomendasi tidak ditindaklanjuti	ROO.24.36.28.11.KM	3	4	16
12.	Tidak sinkronnya Dokumen Renja OPD (bid. pembangunan manusia) dengan dokumen RKPD Kota Dumai	ROO.24.36.28.12.KM	3	2	11
13.	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJMD/RKPD) bidang pembangunan manusia	ROO.24.36.28.13.KM	3	2	11
14.	Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (bid. pembangunan manusia) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.24.36.28.14.KM	3	2	11
15.	Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah (bid. pembangunan manusia) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.24.36.28.15.KM	3	2	11
16.	Kurang seriusnya OPD (bid. pembangunan manusia) dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	ROO.24.36.28.16.KM	2	1	3
17.	Data (bid. pembangunan manusia) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey;	ROO.24.36.28.17	3	2	11
18.	Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan di OPD (bid. pembangunan manusia)	ROO.24.36.2818.KM	2	3	10
19.	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. pembangunan manusia) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.24.36.28.19.KM	3	2	11
20.	Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. pembangunan manusia) propinsi/nasional yang berlokasi di Kota Dumai	ROO.24.36.28.20.KM	3	2	11
21.	Tidak sinkronnya Dokumen Renja OPD (bid. perekonomian) dengan dokumen RKPD Kota Dumai	ROO.24.36.28.21.KM	3	2	11
22.	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJMD/RKPD) bidang perekonomian	ROO.24.36.28.22.KM	3	3	14
23.	Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (bid. perekonomian) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.24.36.28.23.KM	3	2	11
24.	Proses pencairan yang lambat diakibatkan tidak lengkapnya berkas administrasi	ROO.24.36.28.24	2	3	10
25.	Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah (bid. perekonomian) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.24.36.28.25.KM	3	2	11
26.	Kurang seriusnya OPD (bid. perekonomian) dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	ROO.24.36.28.26.KM	2	1	3

No.	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f
27.	Proses pencairan yang lambat diakibatkan tidak lengkapnya berkas administrasi	ROO.24.36.28.27	2	3	10
28.	Data (bid. perekonomian) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey;	ROO.24.36.28.28.KM	3	2	11
29.	Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan di OPD (bid. perekonomian)	ROO.24.36.28.29.KM	2	3	10
30.	Proses pencairan yang lambat diakibatkan tidak lengkapnya berkas administrasi	ROO.24.36.28.30	2	3	10
31.	Penyelesaian laporan monitoring yang lama	ROO.24.36.28.31	2	3	10
32.	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. perekonomian) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.24.36.28.32.KM	4	3	17
33.	Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. perekonomian) propinsi/nasional yang berlokasi di Kota Dumai	ROO.24.36.28.33.KM	3	3	14
34.	Proses pencairan yang lambat diakibatkan tidak lengkapnya berkas administrasi	ROO.24.36.28.34	2	3	10
35.	Tidak sinkronnya Dokumen Renja OPD (bid. SDA) dengan dokumen RKPD Kota Dumai	ROO.24.36.28.35.KM	3	2	11
36.	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJMD/RKPD) bidang SDA	ROO.24.36.28.36.KM	3	3	14
37.	Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (bid. SDA) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.24.36.28.37.KM	3	2	11
38.	Proses pencairan yang lambat diakibatkan tidak lengkapnya berkas administrasi	ROO.24.36.28.38	2	3	10
39.	Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah (bid. SDA) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.24.36.28.39.KM	3	2	11
40.	Kurang seriusnya OPD (bid. SDA) dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	ROO.24.36.28.40.KM	2	1	3
41.	Proses pencairan yang lambat diakibatkan tidak lengkapnya berkas administrasi	ROO.24.36.28.41	2	3	10
42.	Data (bid. SDA) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey;	ROO.24.36.28.42.KM	3	2	11
43.	Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan di OPD (bid. SDA)	ROO.24.36.28.43.KM	2	3	10
44.	Proses pencairan yang lambat diakibatkan tidak lengkapnya berkas administrasi	ROO.24.36.28.44	2	3	10
45.	Penyelesaian laporan monitoring yang lama	ROO.24.36.28.45	2	3	10

No.	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f
46.	Tidak sinkronnya Dokumen Renja OPD (bid. Infrastruktur) dengan dokumen RKPD Kota Dumai	ROO.24.36.28.46.KM	3	2	11
47.	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJMD/RKPD) bidang Infrastruktur	ROO.24.36.28.47.KM	3	2	11
48.	Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (bid. Infrastruktur) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.24.36.28.48.KM	3	2	11
49.	Masih terdapatnya perangkat daerah tidak menyampaikan data capaian pembangunan di mitra bidang infrastruktur	ROO.24.36.28.49.KM	3	2	11
50.	Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah (bid. Infrastruktur) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.24.36.28.50.KM	3	2	11
51.	Kurang seriusnya OPD (bid. Infrastruktur) dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	ROO.24.36.28.51.KM	2	1	3
52.	Belum maksimalnya kegiatan asistensi terhadap Perangkat Daerah mitra bidang infrastruktur	ROO.24.36.28.52.KM	2	2	7
53.	Data (bid. Infrastruktur) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey;	ROO.24.36.28.53.KM	3	2	11
54.	Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan di OPD (bid. Infrastruktur)	ROO.24.36.28.54.KM	2	3	10
55.	Tidak tersedianya data pelaksanaan pekerjaan oleh perangkat daerah	ROO.24.36.28.55	3	2	11
56.	Double pencairan perjalanan dinas dalam kota dalam rangka monitoring dengan perjalanan dinas dalam rangka penugasan lainnya di waktu yang bersamaan.	ROO.24.36.28.56	3	2	11
57.	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. Infrastruktur) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.24.36.28.57.KM	3	3	14
58.	Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. Infrastruktur) propinsi/nasional yang berlokasi di Kota Dumai	ROO.24.36.28.58.KM	3	3	14
59.	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. Kewilayahan) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.24.36.28.59.KM	2	2	7
60.	Tidak sinkronnya Dokumen Renja OPD (bid. Kewilayahan) dengan dokumen RKPD Kota Dumai	ROO.24.36.28.60.KM	3	2	11
61.	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD/RPJMD/RKPD) bidang Kewilayahan	ROO.24.36.28.61.KM	3	3	14
62.	Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (bid. Kewilayahan) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.24.36.28.62.KM	3	2	11
63.	Terdapat perangkat daerah yang tidak menyampaikan data capaian pembangunan di mitra bidang kewilayahan	ROO.24.36.28.63.KM	3	3	14

No.	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f
64.	Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah (bid. Kewilayahan) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.24.36.28.64.KM	3	2	11
65.	Kurang seriusnya OPD (bid. Kewilayahan) dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	ROO.24.36.28.65.KM	2	1	3
66.	Belum maksimalnya kegiatan asistensi terhadap Perangkat Daerah mitra bidang kewilayahan	ROO.24.36.28.66.KM	2	2	7
67.	Data (bid. Kewilayahan) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey;	ROO.24.36.28.67.KM	3	2	11
68.	Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan di OPD (bid. Kewilayahan)	ROO.24.36.28.68.KM	2	3	10
69.	Tidak tersedianya data pelaksanaan pekerjaan oleh perangkat daerah bid. Kewilayahan	ROO.24.36.28.69	3	2	11
70.	Double pencairan perjalanan dinas dalam kota dalam rangka monitoring dengan perjalanan dinas dalam rangka penugasan lainnya di waktu yang bersamaan.	ROO.24.36.28.70	3	2	11
71.	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. Kewilayahan) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.24.36.28.71.KM	3	2	11
72.	Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. Kewilayahan) propinsi/nasional yang berlokasi di Kota Dumai	ROO.24.36.28.72.KM	3	3	14
73.	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. Kewilayahan) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.24.36.28.73.KM	2	2	7



Mengetahui,
Kepala Bappeda,

Drs. BUDI HASNUL, M.Si
NIP.19740213.199303.1.002

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta CSA/FGD

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta CSA/FGD

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

Dumai,

Pemilik Risiko :

1. ARIKE TRESMITA, S.Pi, M.Si
NIP.19770405.200112.2.003

2. INSANI TAQWA SAILI, ST
NIP.19870929.201001.1.006

()
()

KERTAS KERJA
DAFTAR RISIKO PRIORITAS

Nama Pemda : Pemerintah Kota Dumai
 Tahun Penilaian : 2024
 Tujuan Strategis : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai
 Urusan Pemerintahan : Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)

No.	a	b	c	d	e	f	g
		Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1.	I. Risiko Strategis Pemda 1. Rendahnya kualitas dokumen perencanaan	RSP.24.36.01.51	19	Walikota Dumai	1. Kualitas sumber daya aparatur yang menyusun perencanaan belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan (pengangkatan dan penempatan pejabat struktural dan fungsional di Bappedalitbang merupakan kewenangan dari Tim Baperjakat dan Kepala Daerah Kebijakan pemerintah pusat yang sebelumnya tidak ada di dokumen pusat namun muncul sebagai respon atas suatu kejadian/kondisi diluar kebiasaan yang mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian-penyesuaian ketika menyusun dokumen perencanaan tahunan daerah Terlambatnya penerbitan pedoman penyusunan RKPD oleh Kemendagri Proses fasilitasi RKPD di Provinsi terlambat Kurangnya komitmen pimpinan Eselon 2 dan pembekalan manajemen kinerja bagi eselon 2	Kurangny nilai unsur perencanaan pada penilaian SAKIP Tidak konsistennya dokumen perencanaan tahunan yang mengakomodir kebijakan pusat yang baru sebagai mandat yang harus dilaksanakan dengan penjabaran dokumen RPJMD	
2.	Keterlambatan penetapan RKPD	RSP.24.36.01.52	16	Walikota Dumai			Keterlambatan proses tahapan APBD
3.	Cascading eselon 2 belum mendukung pemda secara komprehensif	RSP.24.36.01.53	17	Walikota Dumai			Rendahnya pencapaian target tujuan dan sasaran RPJMD

No.	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
II.	Risiko Strategis OPD					
1.	Dokumen perencanaan perangkat daerah tidak sinkron	RSO.24.36.28.01	16	Kepala Bappeda	Kurang konsistennya Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan	Penyusunan dokumen Perencanaan tidak sesuai jadwal
2.	Penyampaian dokumen perencanaan ke Provinsi tidak tepat waktu	RSO.24.36.28.02	14	Kepala Bappeda	Keterlambatan Perangkat Daerah menyampaikan data, Belum tersedianya regulasi yang mengatur terkait sanksi bagi Perangkat Daerah yang terlambat menyampaikan data Belum memiliki database time series yang tersimpan kedalam sistem e-planning (Sebelum ada SIPD)	Jadwal penyusunan penganggaran menjadi tertambat
III.	Risiko Operasional OPD					
1.	Hasil Evaluasi/rekomendasi tidak ditindaklanjuti	ROO.24.36.28.04.KM	16	Kepala Bidang PPM	Pada saat pembahasan dengan PD hanya dihadiri oleh staf	tidak tersampainya informasi ke pejabat di PD
2.	Hasil Evaluasi/rekomendasi tidak ditindaklanjuti	ROO.24.36.28.11.KM	16	Kepala Bidang PPM	Pada saat pembahasan dengan PD hanya dihadiri oleh staf	Tidak tersampainya informasi ke pejabat di PD
3.	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJM/RKPD) bidang perekonomian	ROO.24.36.28.22.KM	14	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastwil	Lemahnya koordinasi antara bidang mitra Bappedaitbang dengan masing-masing OPD mitranya	terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD/RPJM/RKPD) sesuai peraturan yang berlaku
4.	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. perekonomian) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.24.36.28.32.KM	17	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastwil	Dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan belum berpedoman pada perencanaan propinsi dan nasional	Tidak diakomodirnya usulan pemerintah Kota Dumai oleh pemerintah Propinsi/Nasional
5.	Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. perekonomian) propinsi/nasional yang berlokasi di Kota Dumai	ROO.24.36.28.33.KM	14	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastwil	Kurangnya koordinasi pemerintah Kota Dumai dengan pemerintah Propinsi/Pusat	terlambatnya perkembangan pembangunan di Kota Dumai
6.	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJM/RKPD) bidang SDA	ROO.24.36.28.36.KM	14	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastwil	lemahnya koordinasi antara bidang mitra Bappedaitbang dengan masing-masing OPD mitranya	terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD/RPJM/RKPD) sesuai peraturan yang berlaku
7.	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. Infrastuktur) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.24.36.28.57.KM	14	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastwil	Dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan belum berpedoman pada perencanaan propinsi dan nasional	tidak diakomodirnya usulan pemerintah Kota Dumai oleh pemerintah Propinsi/Nasional

No.	Risiko yang Teridentifikasi b	Kode Risiko c	Skala Risiko d	Pemilik Risiko e	Penyebab f	Dampak g
8.	Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. Infrastruktur) propinsi/nasional yang berlokasi di Kota Dumai	ROO.24.36.28.58.KM	14	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infraswil	Kurangnya koordinasi pemerintah Kota Dumai dengan pemerintah Propinsi/Pusat	terlambatnya perkembangan pembangunan di Kota Dumai
9.	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD/RPJMD/RKPD) bidang Kewilayahan	ROO.24.36.28.61.KM	14	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infraswil	lemahnya koordinasi antara bidang mitra Bappedalitbang dengan masing-masing OPD mitranya	terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD/RPJMD/RKPD) sesuai peraturan yang berlaku
10.	Terdapatnya perangkat daerah yang tidak menyampaikan data capaian pembangunan di mitra bidang kewilayahan	ROO.24.36.28.63.KM	14	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infraswil	perangkat daerah belum mampu menyediakan data sesuai kemampuan	tidak dapat merencanakan sesuai dengan kebutuhan yang tepat sasaran
11.	Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. Kewilayahan) propinsi/nasional yang berlokasi di Kota Dumai	ROO.24.36.28.72.KM	14	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infraswil	Kurangnya koordinasi pemerintah Kota Dumai dengan pemerintah Propinsi/Pusat	terlambatnya perkembangan pembangunan di Kota Dumai



Dumai,

Pemilik Risiko :

1. ARIKE TRESMITA, S.Pi, M.Si
NIP.19770405 200112 2 003

2. INSANI TAQWA SALLI,ST
NIP.19870929 201001 1 006

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan risiko prioritas
- Kolom c diisi dengan kode risiko
- Kolom d diisi dengan skala risiko pada Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko
- Kolom e diisi dengan pemilik risiko pada Kertas Kerja Identifikasi Risiko
- Kolom f diisi dengan penyebab pada Kertas Kerja Identifikasi Risiko
- Kolom g diisi dengan dampak pada Kertas Kerja Identifikasi Risiko

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)**

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kota Dumai
 Tahun Penilaian : 2024
 Tujuan Strategis : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai
 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik / Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I.	Risiko Strategis Pemda						
1.	Rendahnya kualitas dokumen perencanaan	RSP.24.36.01.51	Peningkatan kapasitas melalui diklat non gelar pada pusbindiklatren Bappnas dan lembaga akademis lainnya penyesuaian dokumen rencana tahunan daerah	Masih ada pegawai belum memahami perencanaan pembangunan daerah secara utuh Masih ada kebijakan pusat yang muncul setelah penyesuaian dokumen rencana tahunan	Mengadakan bimbingan teknis, dan diklat mengenai perencanaan pembangunan daerah kepada pegawai Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kepada pemerintah pusat mengenai kebijakan sebelum melakukan penyesuaian dokumen rencana tahunan	Walikota Dumai Walikota Dumai	TW II 2024 TW II 2024
2.	Keterlambatan penetapan RKPD	RSP.24.36.01.52	Koordinasi dan konsultasi ke pemerintah pusat	Pemenuhan hasil fasilitasi sering terkendala ketersediaan data	Melakukan koordinasi dan konsultasi ke pemerintah pusat mengenai data terkait	Walikota Dumai	TW II 2024
3.	Cascading eselon 2 belum mendukung pemda secara komprehensif	RSP.24.36.01.53	Perwako Perubahan Renstra	Cascading belum selaras dengan RPJMD	Melakukan koordinasi dan fasilitasi kepada OPD dalam menyusun cascading agar selaras dengan RPJMD	Walikota Dumai	TW II 2024
II.	Risiko Strategis OPD						
1.	Dokumen perencanaan perangkat daerah tidak sinkron	RSO.24.36.28.01	Melakukan Asistensi dan Koordinasi Dengan Perangkat Daerah	Hasil Asistensi dan Koordinasi hanya di tindak lanjut oleh Perangkat Daerah pada Staf Perencanaan	Menegaskan kepada Kepala Perangkat Daerah melalui surat Kepala Daerah untuk menindaklanjuti hasil asistensi dan koordinasi terkait perencanaan perangkat daerah	Kepala Bappeda	TW II 2024
2.	Penyampaian dokumen perencanaan ke Provinsi tidak tepat waktu	RSO.24.36.28.02	Melakukan Proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu	Adanya kendala SIPD dan terlambatnya terbitnya Permendagri tentang penyusunan RKPD	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait terutama pihak provinsi dan inspektorat daerah	Kepala Bappeda	TW II 2024
III.	Risiko Operasional OPD						
1.	Hasil Evaluasi/rekomendasi tidak ditindaklanjuti	ROO.24.36.28.04.KM	Menegaskan kepada kepala Perangkat daerah untuk memerintahkan pejabat terkait untuk menghadiri pembahasan	masih adanya pejabat terkait yang berhalangan untuk hadir sehingga informasi hasil evaluasi tidak tersampaikan	Menyampaikan hasil pembahasan dan berita acara pembahasan kepada kepala perangkat daerah atau pejabat terkait	Kepala Bidang PPM	TW II 2024

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik / Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
2.	Hasil Evaluasi/rekomendasi tidak diindikasikan	ROO.24.36.28.11.KM	Menegaskan kepada Kepala Perangkat daerah untuk memerintahkan pejabat terkait untuk menghadiri pembahasan	masih adanya pejabat terkait yang berhalangan untuk hadir sehingga informasi hasil evaluasi tidak tersampaikan	Menyampaikan hasil pembahasan dan berita acara pembahasan kepada kepala perangkat daerah atau pejabat terkait	Kepala Bidang PPM	TW II 2024
3.	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJM/RKPD) bidang perekonomian	ROO.24.36.28.22.KM	Melakukan pendampingan dan koordinasi dengan OPD mitra bidang Perekonomian dalam melakukan penyusunan Renja OPD tersebut	masih adanya OPD yang kurang koordinasi terkait penyusunan Renja OPDnya ke bidang Perekonomian	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi intensif dengan perangkat daerah mitra	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastwil	TW II 2024
4.	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. perekonomian) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.24.36.28.32.KM	Mengkoordinasikan setiap kegiatan bid. perekonomian pada dokumen perencanaan pembangunan daerah serta Renja OPD telah memperhatikan pula prioritas pembangunan propinsi dan nasional	Tidak sesuai kondisi di lapangan dengan data yang diperoleh dari OPD terkait	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait data perangkat daerah mitra	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastwil	TW II 2024
5.	Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. perekonomian) propinsi/nasional yang berlokasi di Kota Dumai	ROO.24.36.28.33.KM	melakukan komunikasi dan koordinasi yang lebih intens dengan instansi terkait pada pemerintah propinsi/pusat	Tidak sesuai kondisi di lapangan dengan data yang diperoleh dari OPD terkait	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait data perangkat daerah mitra	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastwil	TW II 2024
6.	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJM/RKPD) bidang SDA	ROO.24.36.28.36.KM	Melakukan pendampingan dan koordinasi dengan OPD mitra bidang SDA dalam melakukan penyusunan Renja OPD tersebut	masih adanya OPD yang kurang koordinasi terkait penyusunan Renja OPDnya ke bidang SDA	Bidang SDA lebih intens untuk mendampingi OPD mitranya dalam menyusun renja	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastwil	TW II 2024
7.	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. Infrastruktur) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.24.36.28.57.KM	Mengkoordinasikan setiap kegiatan bid. infrastruktur pada dokumen perencanaan pembangunan daerah serta Renja OPD telah memperhatikan pula prioritas pembangunan propinsi dan nasional	Tidak sesuai kondisi di lapangan dengan data yang diperoleh dari OPD terkait	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait data perangkat daerah mitra	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastwil	TW II 2024
8.	Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. Infrastruktur) propinsi/nasional yang berlokasi di Kota Dumai	ROO.24.36.28.58.KM	melakukan komunikasi dan koordinasi yang lebih intens dengan instansi terkait pada pemerintah propinsi/pusat	Tidak sesuai kondisi di lapangan dengan data yang diperoleh dari OPD terkait	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait data perangkat daerah mitra	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastwil	TW II 2024

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik / Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
9.	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD/RPJMD/RKPD) bidang Kewilayahan	ROO.24.36.28.61.KM	Melakukan pendampingan dan koordinasi dengan OPD mitra bidang Infrastruktur dalam melakukan penyusunan Renja OPD tersebut	masih adanya OPD yang kurang koordinasi terkait penyusunan Renja OPDnya ke bidang Infrastruktur	Bidang Infrastruktur lebih intens untuk mendampingi OPD mitranya dalam menyusun renja	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastwil	TW II 2024
10.	Terdapatnya perangkat daerah yang tidak menyampaikan data capaian pembangunan di mitra bidang kewilayahan	ROO.24.36.28.63.KM	Melakukan komunikasi kepada perangkat daerah melalui surat dinas perihal permohonan data capaian pembangunan	Masih adanya perangkat daerah yang mengabaikan surat dinas dan tidak menyampaikan data capaian pembangunan	Melakukan komunikasi lebih intens kepada perangkat daerah mengenai permohonan penyampaian data capaian pembangunan bidang kewilayahan	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastwil	TW II 2024
11.	Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. Kewilayahan) propinsi/nasional yang berlokasi di Kota Dumai	ROO.24.36.28.72.KM	melakukan komunikasi dan koordinasi yang lebih intens dengan instansi terkait pada pemerintah propinsi/pusat	Tidak sesuai kondisi di lapangan dengan data yang diperoleh dari OPD terkait	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait data perangkat daerah mitra	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastwil	TW II 2024

Mengetahui,
Kepala Bappeda,

Dis. BUDHI HASNUL, M.Si
NIP. 19740213 199303 1 002

Dumai,

Pemilik Risiko :

1. ARIKE TRESMITA, S.Pi, M.Si
NIP.19770405 200112 2 003
2. INSANI TAQWA SAILI,ST
NIP.19870929 201001 1 006

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan risiko prioritas
Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehan.

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:

(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,

(2) Prosedur pengendalian belum/ tidak dapat dilaksanakan,

(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,

(4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Rencana dan Realisasi Pemantauan atas Kegiatan Pengendalian Intern yang Dibutuhkan

Nama Pemerintah Daerah
 Tahun Penilaian
 Tujuan Strategis
 Urusan Pemerintahan

: Pemerintah Kota Dumai
 : 2024
 : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai
 : Unsur Penunjang Urusan Pemerintah (Perencanaan)

No.	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1.	Mengadakan bimbingan teknis, dan diklat mengenai perencanaan pembangunan daerah kepada pegawai	Mengumpulkan sertifikat hasil dari bimbingan teknis dan diklat perencanaan pembangunan	Walikota Dumai	TW IV 2024	TW I s.d TW IV	
2.	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kepada pemerintah pusat mengenai kebijakan sebelum melakukan penyusunan dokumen rencana tahunan	Melakukan konfirmasi melalui laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah pusat	Walikota Dumai	TW IV 2024	TW I s.d TW III	
3.	Melakukan koordinasi dan konsultasi ke pemerintah pusat mengenai data terkait	Melakukan konfirmasi melalui laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah pusat	Walikota Dumai	TW IV 2024	TW I s.d TW III	
4.	Melakukan koordinasi dan fasilitasi kepada OPD dalam menyusun cascading agar selaras dengan RPJMD	Melakukan konfirmasi melalui laporan keselarasan antara cascading dengan RPJMD	Walikota Dumai	TW IV 2024	TW I s.d TW III	
5.	Menegaskan kepada Kepala Perangkat Daerah melalui surat Kepala Daerah untuk menindaklanjuti hasil asistensi dan koordinasi terkait perencanaan perangkat daerah	Melakukan konfirmasi dan verifikasi terkait dokumen perencanaan daerah	Kepala Bappeda	TW IV 2024	TW I s.d TW III	
6.	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait terutama pihak provinsi dan inspektorat	Melakukan koordinasi dengan provinsi dan inspektorat terkait pelaksanaan koordinasi	Kepala Bappeda	TW IV 2024	TW I s.d TW III	
7.	Menyampaikan hasil pembahasan dan berita acara pembahasan kepada kepala perangkat daerah atau pejabat terkait	Mengkoordinir hasil evaluasi/rekomendasi tindak lanjut	Kepala Bidang PPM	TW IV 2024	TW I	
8.	Menyampaikan hasil pembahasan dan berita acara pembahasan kepada kepala perangkat daerah atau pejabat terkait	Mengkoordinir hasil evaluasi/rekomendasi tindak lanjut	Kepala Bidang PPM	TW IV 2024	TW I	
9.	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait data perangkat daerah mitra	Melakukan konfirmasi melalui surat dan asistensi langsung dengan perangkat daerah	Kepala Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Perekonomian dan SDA	TW IV 2024	TW I s.d TW II	

No.	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
10.	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait data perangkat daerah mitra	Melakukan konfirmasi melalui surat dan asistensi langsung dengan perangkat daerah	Kepala Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Perencanaan dan SDA	TW IV 2024	TW I s d IV	
11.	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait data perangkat daerah mitra	Melakukan konfirmasi melalui surat dan asistensi langsung dengan perangkat daerah	Kepala Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Perencanaan dan SDA	TW IV 2024	TW I s d IV	
12.	Bidang SDA lebih intens untuk mendampingi OPD mitranya dalam menyusun renja	Melakukan konfirmasi melalui laporan/notulensi/berita acara	Kepala Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Perencanaan dan SDA	TW IV 2024	TW I s d IV	
13.	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait data perangkat daerah mitra	Melakukan konfirmasi melalui surat dan asistensi langsung dengan perangkat daerah	Kepala Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Perencanaan dan SDA	TW IV 2024	TW I s d IV	
14.	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait data perangkat daerah mitra	Melakukan konfirmasi melalui surat dan asistensi langsung dengan perangkat daerah	Kepala Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Perencanaan dan SDA	TW IV 2024	TW I s d IV	
15.	Bidang Infrastruktur lebih intens untuk mendampingi OPD mitranya dalam menyusun renja	Melakukan konfirmasi melalui laporan/notulensi/berita acara	Kepala Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Perencanaan dan SDA	TW IV 2024	TW I s d IV	
16.	Melakukan komunikasi lebih intens kepada perangkat daerah mengenai permohonan penyampaian data capaian pembangunan bidang kewilayahan	Melakukan konfirmasi melalui surat dan asistensi langsung dengan perangkat daerah	Kepala Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Perencanaan dan SDA	TW IV 2024	TW I s d IV	
17.	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait data perangkat daerah mitra	Melakukan konfirmasi melalui surat dan asistensi langsung dengan perangkat daerah	Kepala Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Perencanaan dan SDA	TW IV 2024	TW I s d IV	



Dumai,
 Pemilik Risiko :
 1. ARIKE TRESMITA, S.Pi, M.Si
 NIP.19770405 200112 2 003
 2. INSANI TAQWA SAILI,ST
 NIP.19870929 201001 1 006

()
 ()

Keterangan Kolom a berdasarkan nomor urut
 Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
 Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan
 Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan
 Kolom e diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan
 Kolom f diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan
 Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan hasil kegiatan pemantauan, pelaksanaan monitoring, pendokumentasian, pendistribusian, dan ki

Form 4
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Dumai
Tahun Penilaian	: 2024
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026
Sumber data	: RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026
Visi	Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu
Misi Strategis RPJMD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berjati Diri Melayu 3. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas 4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik
Penetapan Konteks Misi Risiko Strategis Pemda	4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik
Tujuan Strategis RPJMD	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera 1.2 Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah 2.1 Membangun masyarakat Dumai yang Produktif, berdaya saing dan sejahtera 3.1 Mewujudkan infrastruktur dan Ruang kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan 3.2 Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana alam dan non alam 4.1 Meningkatkan Reformasi Birokrasi
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	4.1 Meningkatkan Reformasi Birokrasi
Sasaran RPJMD	4.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	<p>4.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah</p> <p>Akuntabilitas pemerintah daerah merupakan pertanggungjawaban dari tugas, kewajiban dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang harus dilakukan dengan mendayagunakan secara optimal sumberdaya dan potensi yang tersedia secara benar dengan hasil yang terukur sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.</p>
IKU Sasaran RPJMD	<p>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah</p> <p>Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Setiap Tahun</p> <p>Indeks Manajemen Resiko</p>
Penetapan Konteks IKU Risiko Strategis Pemda	<p>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah</p> <p>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah adalah suatu perhitungan nilai dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah</p>
	<p>Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Setiap Tahun</p> <p>Opini BPK terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tiap Tahun merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang berdasarkan Audit BPK atas LKPD tahunan</p>
	<p>Indeks Manajemen Resiko</p> <p>Indeks Manajemen Risiko merupakan Index yang digunakan untuk mengukur efektivitas Manajemen Risiko di suatu pemerintahan daerah berdasarkan kemampuannya untuk mencapai tujuan terkait dengan Strategi, Operasional, Pelaporan, dan Kepatuhan.</p>
Prioritas Pembangunan dan Program Unggulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 2. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Urusan Pemerintahan Daerah	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. BAPPEDA 2. INSPEKTORAT 3. BAPENDA 4. BPKAD
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Tujuan: 4.1 Meningkatkan Reformasi Birokrasi</p> <p>Sasaran : 4.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah</p> <p>IKU Sasaran : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Setiap Tahun Indeks Manajemen Resiko</p> <p>Program : 1. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</p>
<p style="text-align: right;">Dumai, Kantor Wali Kota Dumai Kantor Bappeda</p>  <p style="text-align: right;">Drs. BUDHI HASNUL, M.Si NIP. 19740215 199303 1 002</p>	


Form 5
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Dumai	
Tahun Penilaian	:	2024	
Periode yang dinilai	:	Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	:	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
OPD yang dinilai	:	Bappeda Kota Dumai	
Sumber data	:	Renstra Bappeda Kota Dumai Tahun 2021-2026	
Tujuan Strategis	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai		
Sasaran Strategis	1.	Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional	
IKU Renstra OPD	IKU		2026
	1.	INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (IPPN) PEMDA (Konteks : untuk mengukur kualitas perencanaan daerah yang terdiri dari komponen sinergi perencanaan, kualitas perencanaan dan keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja)	100
	2.	Keselarasn dokumen RPJMD Kota Dumai dengan dokumen RPJMN (Komponen Sinergi)	9
	3.	Keselarasn dokumen RKPD Kota Dumai dengan dokumen RKP (Komponen Sinergi)	13
	4.	Kesesuaian APBD Kota Dumai membiayai program prioritas Nasional dalam RKPD (Komponen Sinergi)	10
	5.	Kesesuaian antara Isu Strategis-Target dengan Program/Kegiatan/ Proyek di RPJMD Kota Dumai atau RKPD (Komponen Kualitas)	49
	6.	Inovasi perencanaan pembangunan (Konteks Kualitas)	9
	7.	Target dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran OPD terkait (Komponen keterhubungan renbang dan renkin)	10
Program	1.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis:		
		Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai	
	Sasaran Strategis:		
		Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional	
	IKU Strategis:		
		Keselarasn dokumen RPJMD Kota Dumai dengan dokumen RPJMN (Komponen Sinergi)	9
		Keselarasn dokumen RKPD Kota Dumai dengan dokumen RKP (Komponen Sinergi)	13
		Kesesuaian APBD Kota Dumai membiayai program prioritas Nasional dalam RKPD (Komponen Sinergi)	10
		Target dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran OPD terkait (Komponen keterhubungan renbang dan renkin)	10

	Program :	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
<p>Dumai, Kecamatan Kota Dumai Kantor Bappeda</p>  <p>Drs. RUDHI MASNUL, M.Si NIP. 19740213 199303 1 002</p>		

Form 6
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	Pemerintah Kota Dumai	
Tahun Penilaian	2024	
Periode yang dinilai	Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
OPD yang dinilai	Bappeda Kota Dumai	
Sumber data	Renstra Bappeda Kota Dumai Tahun 2021-2026	
Tujuan Strategis	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai	
Sasaran Strategis	1. Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional	
Program (Renja 2024)	<ol style="list-style-type: none"> 1. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 2. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 	
Keluaran / Hasil Kegiatan	IKU	2024
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah 2. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang urusan perencanaan 4. Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 5. Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 6. Jumlah dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan kewilayahan 	<ol style="list-style-type: none"> 4 dokumen 2 dokumen 1 Dokumen 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen
Program, Kegiatan/Sub Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan/Sub Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program: PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</p> <p>Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan <p>Sub Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 2 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 3 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 6 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 7 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 9 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 10 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 11 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 12 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan <p>Keluaran/Hasil Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 	

	<p>2 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan</p> <p>3 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>4 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia</p> <p>5 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>6 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian</p> <p>7 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>8 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA</p> <p>9 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>10 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur</p> <p>11 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>12 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan</p>
<div style="text-align: center;">  <p>Dumai, n Wali Kota Dumai Kepala Bappeda</p> <p>BAPP DUMAI BUDHI HASNUL, M.Si NIP. 19740213 199303 1 002</p> </div>	

KERTAS KERJA
IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Nama Pemda : Pemerintah Kota Dumai Nama OPD : Bappeda Kota Dumai Tahun Penilaian : 2024 Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2021-2026 Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		Dampak		Pihak yang terkena
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Eksternal/Internal)	Uraian	C/UC	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan Strategis: Meningkatkan Reformasi Birokrasi Sasaran Strategis: Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Rendahnya kualitas dokumen perencanaan	RSP.24.36.01.51	Walikota Dumai	1. Kualitas sumber daya aparatur yang menyusun perencanaan belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan (pengangkatan dan penempatan pejabat struktural dan fungsional di Bappedalitbang merupakan kewenangan dari Tim Baperjakat dan Kepala Daerah 2. Kebijakan pemerintah pusat yang sebelumnya tidak ada di dokumen pusat namun muncul sebagai respon atas suatu kejadian/kondisi diluar kebiasaan yang mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian-penyesuaian ketika menyusun dokumen perencanaan tahunan daerah	Internal	C UC	1. Kurangnya nilai unsur perencanaan pada penilaian SAKIP 2. Tidak konsistennya dokumen perencanaan tahunan yang mengakomodir kebijakan pusat yang baru sebagai mandat yang harus dilaksanakan dengan penjabaran dokumen RPJMD	Pemerintah Kota Dumai

No	Tujuan/ Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		Sumber (Eksternal/Internal)	CUC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Uraian			Uraian	Pinak yang Berkekuasaan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
	Program: PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Keterlambatan penetapan RKPD	RSP.24.36.01.52	Walikota Dumai	1. Terlambatnya penerbitan pedoman penyusunan RKPD oleh Kemendagri 2. Proses fasilitasi RKPD di Provinsi terlambat	Eksternal	UC	Keterlambatan proses lanapan APBD	Pemerintah Kota Dumai	
			Cascading eselon 2 belum mendukung pemda secara komprehensif dst.	RSP.24.36.01.53	Walikota Dumai	Kurangnya komitmen pimpinan Eselon 2 dan pembekalan manajemen kinerja bagi eselon 2	Internal	C	Rendahnya pencapaian target tujuan dan sasaran RPJMD	Walikota	



Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan tujuan strategis sebagaimana tercantum dalam RPJMD
- Kolom c diisi dengan indikator kinerja sasaran strategis
- Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
- Kolom e diisi dengan kode risiko
- Kolom f diisi dengan pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko
- Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : **Man, Money, Method, Machine, dan Material**
- Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
- Kolom i diisi dengan C jika unit kerja mampu mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
- Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: **Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum**
- Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

KERTAS KERJA
IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kota Dumai Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun Penilaian : 2024 Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2021-2026 Urusan Pemerintah : Unsur Penunjang Urusan Pemerintah (Perencanaan) Tujuan Strategis : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai										
No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Eksternal/Internal)		Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan OPD: Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai	1. INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (IPPN) PEMDA (Konteks : untuk mengukur kualitas perencanaan daerah yang terdiri dari komponen sinergi perencanaan, kualitas perencanaan dan keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja)								
	Sasaran OPD: Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional	2. Keselarasan dokumen RPJMD Kota Dumai dengan dokumen RPJMN (Komponen Sinergi) 3. Keselarasan dokumen RKPD Kota Dumai dengan dokumen RKP (Komponen Sinergi) 4. Kesesuaian APBD Kota Dumai membiayai program prioritas Nasional dalam RKPD (Komponen Sinergi) 5. Kesesuaian antara Isu Strategis-Target dengan Program/Kegiatan/ Proyek di RPJMD Kota Dumai atau RKPD (Komponen Kualitas) 6. Inovasi perencanaan pembangunan (Konteks Kualitas) 7. Target dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran OPD terkait (Komponen keterhubungan renbang dan renkin)								

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Eksternal/Internal)		Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Program: PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan 2. Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Dokumen perencanaan perangkat daerah tidak sinkron Penyampaian dokumen perencanaan ke Provinsi tidak tepat waktu	RSO 24.36.28.01 RSO 24.36.28.02	Kepala Bappeda Kepala Bappeda	Kurang konsistennya Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan 1. Keterlambatan Perangkat Daerah menyampaikan data. 2. Belum tersedianya regulasi yang mengatur terkait sanksi bagi Perangkat Daerah yang terlambat 3. Belum memiliki database time series yang tersimpan kedalam sistem e-planning (Sebelum ada SIPD)	Eksternal Eksternal Internal Eksternal	C	Penyusunan dokumen Perencanaan tidak sesuai jadwal Jadwal penyusunan penganggaran menjadi terhambat	Bappeda Pemerintah Kota Dumai



Dumai,
 Pemilik Risiko :
 1. ARIKE TRESMITA, S.Pi, M.Si
 NIP. 19770405 200112 2 003
 2. INSANI TAQWA SAILI, ST
 NIP. 19870929 201001 1 006

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor unit
- Kolom b diisi dengan tujuan sebagaimana tercantum dalam Renstra
- Kolom c diisi dengan indikator kinerja utama
- Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
- Kolom e diisi dengan kode risiko
- Kolom f diisi dengan pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko
- Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : **Man, Money, Method, Machine, dan Material**
- Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
- Kolom i diisi dengan C jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
- Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: **Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum**
- Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

KERTAS KERJA
IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kota Dumai Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun Penilaian : 2024 Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2021-2026 Urusan Pemerintahan : Unsur Penunjang Urusan Pemerintah (Perencanaan) Tujuan Strategis : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai Sasaran Strategis : Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional											
No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko Operasional/Risiko Fraud/Risiko Kemifraan				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Eksternal/ Internal)		Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Program: PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH										
	Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia										
	Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang dikordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Perencanaan	Tidak sinkronnya Dokumen Renja OPD (bid. pemerintahan) dengan dokumen RKPD Kota Dumai	ROO 24.36.28.01.KM	Kepala Bidang PPM	Dalam penyusunan Renja OPD belum mempedomani peraturan yang berlaku	Internal dan Eksternal	C	terhambatnya jadwal dan proses perencanaan pembangunan daerah	Pemerintah Kota Dumai
			Pelaksanaan	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJM/RKPD) bidang Pemerintahan	ROO 24.36.28.02.KM	Kepala Bidang PPM	lemahnya koordinasi antara bidang mitra Bappedalibang dengan masing-masing OPD mitranya	Internal dan Eksternal	C	terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD/RPJM/RKPD) sesuai peraturan yang berlaku	Pemerintah Kota Dumai

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko Operasional/Risiko Fraud/Risiko Kemirraan					Sebab		CAUC	Dampak		
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Eksternal/ Internal)	Uraian		Pihak yang terkena		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l		
Sub Kegiatan: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah perangkat daerah yang dilakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah	Pemantauan dan evaluasi	Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (bid pemerintahan) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.24.36.28.03.KM	Kepala Bidang PPM	keterbatasan anggaran dan ketidak sesuai usulan dengan prioritas pembangunan daerah	Internal dan Eksternal	UC	tidak terlaksananya beberapa pembangunan sesuai usulan masyarakat yang menyebabkan menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah	Pemerintah Kota Dumai dan Stakeholder pembangunan		
			Pelaporan dan pertanggung jawaban	Hasil Evaluasi/rekomendasi tidak dilindaklanjuti	ROO.24.36.28.04.KM	Kepala Bidang PPM	Pada saat pembahasan dengan PD hanya dihadiri oleh staf	Eksternal	C	tidak terlaksananya informasi ke pejabat di PD	Stakeholder		
			Perencanaan	Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah (bid. pemerintahan) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.24.36.28.05.KM	Kepala Bidang PPM	Dalam menyusun Renja OPD masih ada yang belum berpedoman pada RKPD	internal	C	Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPD Kota Dumai	Bappeda dan Pemerintah Kota Dumai		
			Pelaksanaan	Kurang serusnya OPD (bid. Pemerintahan) dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	ROO.24.36.28.06.KM	Kepala Bidang PPM	Keterbatasan kemampuan SDM yang menangani perencanaan di OPD	Eksternal	C	Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPD Kota Dumai	Bappeda dan Pemerintah Kota Dumai		
			Pemantauan dan evaluasi										
			Pelaporan dan pertanggung jawaban										
			Perencanaan	Data (bid. Pemerintahan) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey.	ROO.24.36.28.07	Kepala Bidang PPM	Sumber data yang tidak valid dan kesalahan SDM dalam merekapnya	Internal dan eksternal	C	Menghambat pelaksanaan survey	Bappeda		

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko Operasional/Risiko Fraud/Risiko Komitran					Sebab		CAUC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Eksternal/Internal)	Uraian		Fihak yang Berkepentingan	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
		pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	Pelaksanaan	Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan di OPD (bid. Pemerintahan)	ROO 24.36.28.08 KM	Kepala Bidang PPM	kurangnya koordinasi dengan mitra bidang pemerintahan	internal dan eksternal	C	Hasil survey yang tidak sesuai dengan yang direncanakan	Blappeda	
			Pemantauan dan evaluasi									
			Pelaporan dan pertanggung jawaban									
			Perencanaan	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. Pemerintahan) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO 24.36.28.09 KM	Kepala Bidang PPM	Dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan belum berpedoman pada perencanaan propinsi dan nasional	internal dan eksternal	C	Tidak diakomodirnya usulan pemerintah Kota Dumai oleh pemerintah Propinsi/Nasional	Pemerintah Kota Dumai	
			Pelaksanaan	Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. Pemerintahan) propinsi/nasional yang bertokasi di Kota Dumai	ROO 24.36.28.10 KM	Kepala Bidang PPM	Kurangnya koordinasi pemerintah Kota Dumai dengan pemerintah Propinsi/Pusat	internal dan eksternal	C	Terlambatnya perkembangan pembangunan di Kota Dumai	Pemerintah Kota Dumai	
			Pemantauan dan evaluasi	Hasil Evaluasi/rekomendasi tidak ditindaklanjuti	ROO 24.36.28.11 KM	Kepala Bidang PPM	Pada saat pembahasan dengan PD hanya dihadiri oleh staf	eksternal	C	Tidak tersampainya informasinya ke pejabat di PD	Stakeholder	
			Pelaporan dan pertanggung jawaban									
			Perencanaan	Tidak sinkronnya Dokumen Renja OPD (bid. pembangunan manusia) dengan dokumen RKPd Kota Dumai	ROO 24.36.28.12 KM	Kepala Bidang PPM	Dalam penyusunan Renja OPD belum mempedomani peraturan yang berlaku	internal dan eksternal	C	Terhambatnya jadwal dan proses perencanaan pembangunan daerah	Pemerintah Kota Dumai	

Sub Kegiatan:
 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia yang

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko Operasional/Risiko Fraud/Risiko Kemitraan					Setab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Eksternal/ Internal)	Uraian		Uraian	Prak yang terkena
a		c dikoordinir penyusunannya (RP-JPD, RP-JMD, dan RKPD)	d Pelaksanaan	e Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RP-JPD/RP-JMD/RKPD) bidang pembangunan manusia Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (bid. pembangunan manusia) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	f ROO 24.36.28.13 KM	g Kepala Bidang PPM	h Lemahnya koordinasi antara bidang mitra Bappedalitbang dengan masing-masing OPD mitranya	i internal dan eksternal	C	k Terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan (RP-JPD/RP-JMD/RKPD) sesuai peraturan yang berlaku	l Pemerintah Kota Dumai	
			Pemantauan dan evaluasi		ROO 24.36.28.14 KM	Kepala Bidang PPM	Keterbatasan anggaran dan ketidak sesuai usulan dengan prioritas pembangunan daerah	internal dan eksternal	UC	Tidak terlaksananya beberapa pembangunan sesuai usulan masyarakat yang menyebabkan menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah	Pemerintah Kota Dumai dan Stake holder Pembangunan	
			Pelaporan dan pertanggung jawaban									
			Perencanaan	Adanya program dan kegiatan prioritas Kepala daerah (bid. pembangunan manusia) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO 24.36.28.15 KM	Kepala Bidang PPM	Dalam menyusun Renja OPD masih ada yang belum berpedoman pada RKPD	internal dan eksternal	C	Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPD Kota Dumai	Bappeda dan Pemerintah Kota Dumai	
			Pelaksanaan	Kurang selusnya OPD (bid. pembangunan manusia) dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	ROO 24.36.28.16 KM	Kepala Bidang PPM	Keterbatasan kemampuan SDM yang mennganti perencanaan di OPD	eksternal	C	Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPD Kota Dumai	Bappeda dan Pemerintah Kota Dumai	
			Pemantauan dan evaluasi									
			Pelaporan dan pertanggung jawaban									

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko Operasional/Risiko Fraud/Risiko Kemitraan					Setback		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Eksternal/Internal)	Uraian		Uraian	Pisak yang terduga
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang pembangunan manusia	Perencanaan	Data (bid. pembangunan manusia) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey.	ROO.24.36.28.17	Kepala Bidang PPM	Sumber data yang tidak valid dan kesalahan SDM dalam merekapnya	internal dan eksternal	C	Menghambat pelaksanaan survey	Bappeda	
			Pelaksanaan	Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan di OPD (bid. pembangunan manusia)	ROO.24.36.28.18 KM	Kepala Bidang PPM	Kurangnya koordinasi dengan mitra bidang pemerintahan	internal dan eksternal	C	Hasil survey yang tidak sesuai dengan yang direncanakan	Bappeda	
	Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDRP/JMD pada bidang pemerintahan	Pemantauan dan evaluasi									
			Pelaporan dan pertanggung jawaban	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. pembangunan manusia) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.24.36.28.19 KM	Kepala Bidang PPM	Dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan belum berpedoman pada perencanaan propinsi dan nasional	internal dan eksternal	C	Tidak diakomodirnya usulan pemerintah Kota Dumai oleh pemerintah Propinsi/Nasional	Pemerintah Kota Dumai	
			Pelaksanaan	Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. pembangunan manusia) propinsi/nasional yang berlokasi di Kota Dumai	ROO.24.36.28.20 KM	Kepala Bidang PPM	Kurangnya koordinasi pemerintah Kota Dumai dengan pemerintah Propinsi/Pusat	internal dan eksternal	C	Terlambatnya perkembangan pembangunan di Kota Dumai	Pemerintah Kota Dumai	
			Pemantauan dan evaluasi									

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko Operasional/Risiko Fraud/Risiko Kemitraan					Sebab		CAUC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Eksternal/ Internal)	Uraian		Fisik yang terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
			Pelaporan dan bertanggung jawaban									
	Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)											
	Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang dikordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Perencanaan	Tidak sinkronnya Dokumen Renja OPD (bid. perekonomian) dengan dokumen RKPD Kota Dumai	ROO 24.36.28.21.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Dalam penyusunan Renja OPD belum mempedomani peraturan yang berlaku	Internal dan Eksternal	C	terlambatnya jadwal dan proses perencanaan pembangunan daerah	Pemerintah Kota Dumai	
			Pelaksanaan	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJM/RKPD) bidang perekonomian	ROO 24.36.28.22.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Lemahnya koordinasi antara bidang mitra Bappedalitbang dengan masing-masing OPD mitranya	Internal dan Eksternal	C	terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD/RPJM/RKPD) sesuai peraturan yang berlaku	Pemerintah Kota Dumai	
			Pemantauan dan evaluasi	Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (bid. perekonomian) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO 24.36.28.23.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Keterbatasan anggaran dan kelidak sesuai usulan dengan prioritas pembangunan daerah	Internal dan Eksternal	UC	tidak terlaksananya beberapa pembangunan sesuai usulan masyarakat yang menyebabkan menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah	Pemerintah Kota Dumai dan Stakeholder pembangunan	
			Pelaporan dan bertanggung jawaban	Proses pencairan yang	ROO 24.36.28.24	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	SDM yang bersangkutan lama	Internal	C	Proses pencairan yang lambat	Pemerintah Kota	

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko Operasional/Risiko Fraud/Risiko Kemitraan					Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Eksternal/Internal)	Uraian		Pihak yang terkena	
a	Sub Kegiatan: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	c Jumlah perangkat daerah yang dilakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah	d Perencanaan	e Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah (bid. perekonomian) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	f ROO 24.36.28.25 KM	g Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	h Dalam menyusun Renja OPD masih ada yang belum berpedoman pada RKPD	i internal dan eksternal	j C	k Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPD Kota Dumai	l Bappeda dan Pemerintah Kota Dumai	
			d Pelaksanaan	e Kurang senyusunya OPD (bid. perekonomian) dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	f ROO 24.36.28.26 KM	g Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	h keterbatasan kemampuan SDM yang menangani perencanaan di OPD	i eksternal	j C	k Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPD Kota Dumai	l Bappeda dan Pemerintah Kota Dumai	
			d Pemantauan dan evaluasi	e Proses pencairan yang lambat diakibatkan tidak	f ROO 24.36.28.27	g Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan	h SDM yang bersangkutan lama menyerahkan berkas	i internal	j C	k Proses pencairan yang lambat dan menumpuk	l Pemerintah Kota Dumai	
			d Pelaporan dan pertanggung jawaban	e Data (bid. perekonomian) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey.	f ROO 24.36.28.28 KM	g Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	h Sumber data yang tidak valid dan kesalahan SDM dalam merekapnya	i internal dan eksternal	j C	k menghambat pelaksanaan survey	l Bappeda	
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	c Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang perekonomian	d Pelaksanaan	e Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan di OPD (bid. perekonomian)	f ROO 24.36.28.29 KM	g Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	h Kurangnya koordinasi dengan mitra bidang pemerintahan	i internal dan eksternal	j C	k hasil survey yang tidak sesuai dengan yang direncanakan	l Bappeda	
			d Pemantauan dan evaluasi	e Proses pencairan yang lambat diakibatkan tidak lengkapnya berkas administrasi	f ROO 24.36.28.30	g Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	h SDM yang bersangkutan lama menyerahkan berkas administrasi ke bendahara bidang	i internal	j C	k Proses pencairan yang lambat dan menumpuk	l Pemerintah Kota Dumai	
			d Pelaporan dan pertanggung jawaban	e Penyelesaian laporan monitoring yang lama	f ROO 24.36.28.31	g Kepala Bidang Perekonomian, SDA,	h Pengerjaan laporan monitoring tidak dilakukan bersama tim	i internal	j C	k Proses pengarsipan bermasalah	l Pemerintah Kota Dumai	

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko Operasional/Risiko Fraud/Risiko Kemitraan				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Eksternal/Internal)		Uraian	Pihak yang terpengaruh
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan		Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/RPJMD pada bidang perekonomian	Perencanaan	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. perekonomian) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO 24.36.28.32 KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan belum berpedoman pada perencanaan propinsi dan nasional	internal dan eksternal	C	tidak diakomodirnya usulan pemerintah Kota Dumai oleh pemerintah Propinsi/Nasional	Pemerintah Kota Dumai
			Pelaksanaan	Tidak adanya prioritas	ROO 24.36.28.33 KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Kurangnya koordinasi	internal	C	terlambatnya perkembangan pembangunan di Kota Dumai	Pemerintah Kota Dumai
			Pemantauan dan evaluasi	Proses pencairan yang lambat diakibatkan tidak lengkapnya berkas administrasi	ROO 24.36.28.34	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	SDM yang bersangkutan lama menyerahkan berkas administrasi ke bendahara bidang	internal	C	Proses pencairan yang lambat dan menumpuk	Pemerintah Kota Dumai
Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang dikordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPJ)	Pelaporan dan pertanggung jawaban								
			Perencanaan	Tidak sinkronnya Dokumen Renja OPD (bid. SDA) dengan dokumen RKPJ Kota Dumai	ROO 24.36.28.35 KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Dalam penyusunan Renja OPD belum mempedomani peraturan yang berlaku	internal dan eksternal	C	terlambatnya jadwal dan proses perencanaan pembangunan daerah	Pemerintah Kota Dumai
			Pelaksanaan	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJMD/RKPJ) bidang SDA	ROO 24.36.28.36 KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	lemahnya koordinasi antara bidang mitra Bappedalitbang dengan masing-masing OPD mitranya	internal dan eksternal	C	terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD/RPJMD/RKPJ) sesuai peraturan yang berlaku	Pemerintah Kota Dumai

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko Operasional/Risiko Fraud/Risiko Kemlitraan					Sebab		C/JUC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Eksternal/Internal)	Uraian		Uraian	Pihak yang terkena
a			d	e	f	g	h	i	j	k	l	
		c			ROO.24.36.28.37.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (bid. SDA) yang belum terakomodir dalam Renja OPD		internal dan eksternal	UC	tidak terlaksananya beberapa pembangunan sesuai usulan masyarakat yang menyebabkan menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah	Pemko Dumai dan Stake Holder Pembangunan
					ROO.24.36.28.38	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Proses pencairan yang lambat diakibatkan tidak lengkapnya berkas administrasi		internal	C	Proses pencairan yang lambat dan menumpuk	Pemerintah Kota Dumai
					ROO.24.36.28.39.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah (bid. SDA) yang belum terakomodir dalam Renja OPD		internal dan eksternal	C	Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPd Kota Dumai	Sappeda dan Pemerintah Kota Dumai
					ROO.24.36.28.40.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Kurang seriusnya OPD (bid. SDA) dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan		eksternal	C	Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPd Kota Dumai	Sappeda dan Pemerintah Kota Dumai
					ROO.24.36.28.41	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Proses pencairan yang lambat diakibatkan tidak lengkapnya berkas administrasi		internal	C	Proses pencairan yang lambat dan menumpuk	Pemerintah Kota Dumai

Sub Kegiatan:
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

Jumlah perangkat daerah yang dilakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko Operasional/Risiko Fraud/Risiko Kemitraan				Pemilik	Sebab		CAUC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik		Uraian	Sumber (Eksternal/Internal)		Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang SDA	Perencanaan	Data (bid. SDA) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey.	ROO 24.36.28.42 KM	Kepala Bidang Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Sumber data yang tidak valid dan kesalahan SDM dalam merikapnya	internal dan eksternal	C	menghambat pelaksanaan survey	Bappeda	
			Pelaksanaan	Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan di OPD (bid. SDA)	ROO 24.36.28.43 KM	Kepala Bidang Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	kurangnya koordinasi dengan mitra bidang pemerintahan	internal dan eksternal	C	hasil survey yang tidak sesuai dengan yang direncanakan	Bappeda	
			Pemantauan dan evaluasi	Proses pencairan yang lambat diakibatkan tidak lengkapnya berkas administrasi	ROO 24.36.28.44	Kepala Bidang Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	SDM yang bersinggungan lama menyerahkannya ke bendahara administrasi ke bidang	internal	C	Proses pencairan yang lambat dan menumpuk	Pemerintah Kota Dumai	
				Penyelesaian laporan monitoring yang lama	ROO 24.36.28.45	Kepala Bidang	Pengelolaan laporan monitoring tidak dilakukan bersama tim	internal	C	Proses pengisian bermasalah	Pemerintah Kota	
			Pelaporan dan pertanggung jawaban									
	Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan											
	Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang dikordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Perencanaan	Tidak sinkronnya Dokumen Renja OPD (bid. Infrastruktur) dengan dokumen RKPD Kota Dumai	ROO 24.36.28.46 KM	Kepala Bidang Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Dalam penyusunan Renja OPD belum mempedomani peraturan yang berlaku	Internal	C	terlambatnya jekwal dan proses perencanaan pembangunan daerah	Pemerintah Kota	
			Pelaksanaan	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJM/RKPD) bidang Infrastruktur	ROO 24.36.28.47 KM	Kepala Bidang Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	lemahnya koordinasi antara bidang mitra Bappeda/itbang dengan masing-masing OPD mitranya	Internal dan Eksternal	C	terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD/RPJM/RKPD) sesuai peraturan yang berlaku	Pemerintah Kota Dumai	

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko Operasional/Risiko Fraud/Risiko Kemitraan				Sebab		CUC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Eksternal/ Internal)		Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
				Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (bid. Infrastruktur) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.24.36.28.48 KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	keterbatasan anggaran dan ketidak sesuai usulan dengan prioritas pembangunan daerah	Internal dan Eksternal	C	tidak terlaksananya beberapa pembangunan sesuai usulan masyarakat yang menyebabkan menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan daerah	Pemerintah Kota Dumai dan Stakeholder pembangunan
			Pemantauan dan evaluasi	Masih terdapatnya perangkat	ROO.24.36.28.49 KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	perangkat daerah belum mampu menyediakan data sesuai kemampuan	eksternal	C	tidak dapat merencanakan sesuai dengan kebutuhan yang tepat sasaran	Pemerintah Kota
			Pelaporan dan pertanggung jawaban								
			Perencanaan	Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah (bid. Infrastruktur) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.24.36.28.50 KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Dalam menyusun Renja OPD masih ada yang belum berpedoman pada RKPD	internal dan eksternal	C	Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPD Kota Dumai	Bappeda dan Pemerintah Kota Dumai
		Jumlah perangkat daerah yang dilakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah	Pelaksanaan	Kurang seriusnya OPD (bid. Infrastruktur) dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	ROO.24.36.28.51 KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Keterbatasan kemampuan SDM yang menangani perencanaan di OPD	Eksternal	C	Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPD Kota Dumai	Bappeda dan Pemerintah Kota Dumai
			Pemantauan dan evaluasi	Belum maksimalnya kegiatan asistensi terhadap Perangkat Daerah mitra bidang infrastruktur	ROO.24.36.28.52 KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Keterbatasan SDM dalam pemahaman proses bisnis perencanaan	Internal	C	Tidak optimalnya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang infrastruktur	Bappeda
			Pelaporan dan pertanggung jawaban								

Sub Kegiatan:
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

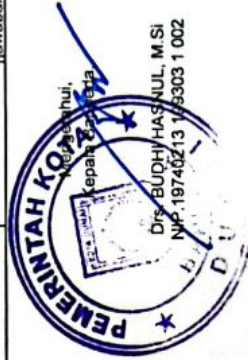
No.	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko Operasional/Risiko Fraud/Risiko Kemirisan					Sebab		C/JC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Eksternal/Internal)	Uraian		Uraian	Pihak yang terkena
a	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	c Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang Infrastruktur	d Perencanaan	e Data (bid. Infrastruktur) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey;	f ROO 24.36.28.53 KM	g Kepala Bidang Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	h Sumber data yang tidak valid dan kesalahan SDM dalam merekapnya	i internal dan eksternal	j C	k menghambat pelaksanaan survey	l Bappeda	
			Pelaksanaan	Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan di OPD (bid. Infrastruktur)	ROO 24.36.28.54 KM	Kepala Bidang Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	kurangnya koordinasi dengan mitra bidang pemerintahan	internal dan eksternal	C	hasil survey yang tidak sesuai dengan yang direncanakan	Bappeda	
			Pemantauan dan evaluasi	Tidak tersedianya data pelaksanaan pekerjaan oleh perangkat daerah	ROO 24.36.28.55		Perangkat daerah belum melaksanakan pekerjaan pada tenggat waktu tertentu (Tahulan tertentu)	internal dan eksternal	C	hasil monitoring dan evaluasi tidak optimal	Bappeda	
				Double pencairan perjalanan dinas dalam kota dalam rangka monitoring dengan perjalanan dinas dalam rangka penguasaan lainnya di waktu yang bersamaan.	ROO 24.36.28.56	Kepala Bidang Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	ketidaktelitian dalam pengajuan pencairan	internal	C	pencairan tidak sesuai ketentuan sehingga perlu dilakukan pengembalian ke kas negara	Bappeda	
			Pelaporan dan pertanggung jawaban									
			Perencanaan	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. Infrastruktur) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO 24.36.28.57 KM	Kepala Bidang Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Dalam penyusunan dokumen pemerintahan bidang perencanaan belum berpedoman pada perencanaan propinsi dan nasional	internal dan eksternal	C	tidak diakomodirnya usulan pemerintah Kota Dumai oleh pemerintah Propinsi/Nasional	Pemerintah Kota Dumai	
	Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Pelaksanaan	Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. Infrastruktur) propinsi/nasional yang berfokus di Kota Dumai	ROO 24.36.28.58 KM	Kepala Bidang Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Kurangnya koordinasi pemerintah Kota Dumai dengan pemerintah Propinsi/Pusat	internal dan eksternal	C	terlambatnya perkembangan pembangunan di Kota Dumai	Pemerintah Kota Dumai	

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko Operasional/Risiko Fraud/Risiko Kemitraan					Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Eksternal/ Internal)	Uraian		Pihak yang terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
			Pemantauan dan evaluasi	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. Kewilayahan) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO 24.36.28.59 KM	Kepala Bidang Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Perubahan standar harga satuan	eksternal	C	Belum konsistensinya dokumen Renstratrenya dengan RKPDRP-JMD	Pemerintah Kota Dumai	
			Pelaporan dan pertanggung jawaban									
	Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RRPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan yang dikordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RRPD)	Perencanaan	Tidak sinkronnya Dokumen Renja OPD (bid. Kewilayahan) dengan dokumen RRPD Kota Dumai	ROO 24.36.28.60 KM	Kepala Bidang Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Dalam penyusunan Renja OPD belum mempedomani peraturan yang berlaku	internal dan eksternal	C	terlambatnya jadwal dan proses perencanaan pembangunan daerah	Pemko Dumai	
			Pelaksanaan	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD/RP-JMD/RRPD) bidang Kewilayahan	ROO 24.36.28.61 KM	Kepala Bidang Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	lemahnya koordinasi antara bidang mitra Bappedalibang dengan masing-masing OPD mitranya	internal dan eksternal	C	terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD/RP-JMD/RRPD) sesuai peraturan yang berlaku	Pemko Dumai	
			Pemantauan dan evaluasi	Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (bid. Kewilayahan) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO 24.36.28.62 KM	Kepala Bidang Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	keterbatasan anggaran dan ketidak sesuai usulan dengan prioritas pembangunan daerah	internal dan eksternal	C	tidak terlaksananya beberapa pembangunan sesuai usulan masyarakat yang menyebabkan menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah	Pemko Dumai dan Stake Holder Pembangunan	
			Pemantauan dan evaluasi	Terdapat perangkat daerah yang tidak menyampaikan data capaian pembangunan di mitra bidang kewilayahan	ROO 24.36.28.63 KM	Kepala Bidang Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	perangkat daerah belum mampu menyediakan data sesuai kemampuan	internal dan eksternal	C	tidak dapat mencanakan sesuai dengan kebutuhan yang tepat sasaran	Pemerintah Kota Dumai	
			Pelaporan dan pertanggung jawaban									
	Sub Kegiatan: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah bidang Kewilayahan yang dilakukan	Perencanaan	Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah (bid. Kewilayahan) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO 24.36.28.64 KM	Kepala Bidang Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Dalam menyusun Renja OPD masih ada yang belum berpedoman pada RRPD	internal dan eksternal	C	Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RRPD Kota Dumai	Bappeda dan Pemerintah Kota Dumai	

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko Operasional/Risiko Fraud/Risiko Kemirraan					Sebab		CAUC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Eksternal/ Internal)	Uraian		Uraian	Phak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
		asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah	Pelaksanaan	Kurang seriusnya OPD (bid. Kewilayahan) dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	ROO.24.36.28.65.KM	Kepala Bidang Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	keterbatasan kemampuan SDM yang menangani perencanaan di OPD	Eksternal	C	Tidak sinkron antara Renja CPD dengan RKPD Kota Dumail	Bappeda dan Pemerintah Kota Dumail	
			Pemantauan dan evaluasi	Belum maksimalnya kegiatan asistensi terhadap Perangkat Daerah mitra bidang kewilayahan	ROO.24.36.28.66.KM	Kepala Bidang Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	keterbatasan SDM dalam pemahaman proses bisnis perencanaan	Internal	C	Tidak optimalnya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang infrastruktur	Bappeda	
			Pelaporan dan pertanggung jawaban									
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang Kewilayahan	Perencanaan	Data (bid. Kewilayahan) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey.	ROO.24.36.28.67.KM	Kepala Bidang Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Sumber data yang tidak valid dan kesalahan SDM dalam merekapnya	internal dan eksternal	C	menghambat pelaksanaan survey	Bappeda	
			Pelaksanaan	Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan di OPD (bid. Kewilayahan) Tidak tersedianya data pelaksanaan pekerjaan oleh perangkat daerah bid. Kewilayahan	ROO.24.36.28.68.KM	Kepala Bidang Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	kurangnya koordinasi dengan mitra bidang pemerintahan	internal dan eksternal	C	hasil survey yang tidak sesuai dengan yang direncanakan	Bappeda	
			Pemantauan dan evaluasi	Double pencairan perjalanan dinas dalam kota dalam rangka monitoring dengan perjalanan dinas dalam rangka penugasan lainnya di waktu yang bersamaan.	ROO.24.36.28.70	Kepala Bidang Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Perangkat daerah belum melaksanakan pekerjaan pada tenggat waktu tertentu (Triwulan tertentu)	internal dan eksternal	C	hasil monitoring dan evaluasi tidak optimal	Bappeda	
			Pelaporan dan pertanggung jawaban				ketidaktelitian dalam pengajuan pencairan	internal	C	pencairan tidak sesuai ketentuan sehingga perlu dilakukan pengembalian ke kas negara	Bappeda	

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko Operasional/Risiko Fraud/Risiko Kemirraan					Sebab		CAUC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Eksternal/Internal)	Uraian		Uraian	Pihak yang terkena
a	Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Kewilayahan	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
			Perencanaan	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. Kewilayahan) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.24.36.28.71 KM	Kepala Dinas / Kabid terkait	Dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan belum berpedoman pada perencanaan propinsi dan nasional	internal dan eksternal	C	tidak diakomodirnya usulan pemerintah Kota Dumai oleh pemerintah Propinsi/Nasional		
			Pelaksanaan	Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. Kewilayahan) propinsi/nasional yang berlokasi di Kota Dumai	ROO.24.36.28.72 KM	Kepala Dinas / Kabid terkait	Kurangnya koordinasi pemerintah Kota Dumai dengan pemerintah Propinsi/Pusat	internal dan eksternal	C	terlambatnya perkembangan pembangunan di Kota Dumai		
			Pemantauan dan evaluasi	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. Kewilayahan) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.24.36.28.73 KM	Kepala Dinas / Kabid terkait	Perubahan standar harga satuan	eksternal	UC	Belum konsistennya dokumen Renstra/renja dengan RKPD/RPJMD		
			Pelaporan dan pertanggung jawaban									

Dumai,
Pemilik Risiko :
1. ARIKE TRESMITA, S.Pi, M.Si
NIP.19770405 200112 2 003
2. INSANI TAQWA SALLI,ST
NIP.19870929 201001 1 006



Keterangan:
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan tujuan sebagaimana tercantum dalam Renstra
Kolom c diisi dengan indikator kinerja kegiatan
Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan
Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
Kolom f diisi dengan kode risiko
Kolom g diisi dengan pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : **Man, Money, Method, Machine, dan Material**
Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
Kolom j diisi dengan C jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: **Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum**
Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

KERTAS KERJA
HASIL ANALISIS RISIKO

Nama Pemda : Pemerintah Kota Dumai Tahun Penilaian : 2024 Tujuan Strategis : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai Urusan Pemerintahan : Unsur Penunjang Urusan Pemerintah (Perencanaan)					
No.	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f
I. Risiko Strategis Pemda					
1.	Rendahnya kualitas dokumen perencanaan	RSP.24.36.01.51	4	4	19
2.	Keterlambatan penetapan RKPD	RSP.24.36.01.52	3	4	16
3.	Cascading eselon 2 belum mendukung pemda secara komprehensif	RSP.24.36.01.53	4	3	17
II. Risiko Strategis OPD					
1.	Dokumen perencanaan perangkat daerah tidak sinkron	RSO.24.36.28.01	3	4	16
2.	Penyampaian dokumen perencanaan ke Provinsi tidak tepat waktu	RSO.24.36.28.02	3	3	14
III. Risiko Operasional OPD					
1.	Tidak sinkronnya Dokumen Renja OPD (bid. pemerintahan) dengan dokumen RKPD Kota Dumai	ROO.24.36.28.01.KM	3	2	11
2.	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJM/RKPD) bidang Pemerintahan	ROO.24.36.28.02.KM	3	2	11
3.	Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (bid. pemerintahan) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.24.36.28.03.KM	3	2	11
4.	Hasil Evaluasi/rekomendasi tidak ditindaklanjuti	ROO.24.36.28.04.KM	3	4	16
5.	Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah (bid. pemerintahan) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.24.36.28.05.KM	3	2	11
6.	Kurang seriusnya OPD (bid. Pemerintahan) dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	ROO.24.36.28.06.KM	2	1	3
7.	Data (bid. Pemerintahan) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey.	ROO.24.36.28.07	3	2	11
8.	Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan di OPD (bid. Pemerintahan)	ROO.24.36.28.08.KM	2	3	10

No.	Risiko yang Teridentifikasi b	Kode Risiko c	Analisis Risiko		
			Skala Dampak d	Skala Kemungkinan e	Skala Risiko f
a					
9.	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. Pemerintahan) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.24.36.28.09.KM	3	2	11
10.	Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. Pemerintahan) propinsi/nasional yang berlokasi di Kota Dumai	ROO.24.36.28.10.KM	3	2	11
11.	Hasil Evaluasi/rekomendasi tidak ditindaklanjuti	ROO.24.36.28.11.KM	3	4	16
12.	Tidak sinkronnya Dokumen Renja OPD (bid. pembangunan manusia) dengan dokumen RKPD Kota Dumai	ROO.24.36.28.12.KM	3	2	11
13.	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJMD/RKPD) bidang pembangunan manusia	ROO.24.36.28.13.KM	3	2	11
14.	Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan resea anggota DPRD (bid. pembangunan manusia) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.24.36.28.14.KM	3	2	11
15.	Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah (bid. pembangunan manusia) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.24.36.28.15.KM	3	2	11
16.	Kurang seriusnya OPD (bid. pembangunan manusia) dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	ROO.24.36.28.16.KM	2	1	3
17.	Data (bid. pembangunan manusia) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey.	ROO.24.36.28.17	3	2	11
18.	Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan di OPD (bid. pembangunan manusia)	ROO.24.36.28.18.KM	2	3	10
19.	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. pembangunan manusia) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.24.36.28.19.KM	3	2	11
20.	Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. pembangunan manusia) propinsi/nasional yang berlokasi di Kota Dumai	ROO.24.36.28.20.KM	3	2	11
21.	Tidak sinkronnya Dokumen Renja OPD (bid. perekonomian) dengan dokumen RKPD Kota Dumai	ROO.24.36.28.21.KM	3	2	11
22.	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJMD/RKPD) bidang perekonomian	ROO.24.36.28.22.KM	3	3	14
23.	Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan resea anggota DPRD (bid. perekonomian) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.24.36.28.23.KM	3	2	11
24.	Proses pencairan yang lambat diakibatkan tidak lengkapnya berkas administrasi	ROO.24.36.28.24	2	3	10
25.	Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah (bid. perekonomian) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.24.36.28.25.KM	3	2	11
26.	Kurang seriusnya OPD (bid. perekonomian) dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	ROO.24.36.28.26.KM	2	1	3

No.	Risiko yang Tidentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f
27.	Proses pencairan yang lambat diakibatkan tidak lengkapnya berkas administrasi	ROO.24.36.28.27	2	3	10
28.	Data (bid. perekonomian) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey.	ROO.24.36.28.28.KM	3	2	11
29.	Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan di OPD (bid. perekonomian)	ROO.24.36.28.29.KM	2	3	10
30.	Proses pencairan yang lambat diakibatkan tidak lengkapnya berkas administrasi	ROO.24.36.28.30	2	3	10
31.	Penyelesaian laporan monitoring yang lama	ROO.24.36.28.31	2	3	10
32.	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. perekonomian) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.24.36.28.32.KM	4	3	17
33.	Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. perekonomian) propinsi/nasional yang berlokasi di Kota Dumai	ROO.24.36.28.33.KM	3	3	14
34.	Proses pencairan yang lambat diakibatkan tidak lengkapnya berkas administrasi	ROO.24.36.28.34	2	3	10
35.	Tidak sinkronnya Dokumen Renja OPD (bid. SDA) dengan dokumen RKPd Kota Dumai	ROO.24.36.28.35.KM	3	2	11
36.	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJMD/RKPD) bidang SDA	ROO.24.36.28.36.KM	3	3	14
37.	Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (bid. SDA) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.24.36.28.37.KM	3	2	11
38.	Proses pencairan yang lambat diakibatkan tidak lengkapnya berkas administrasi	ROO.24.36.28.38	2	3	10
39.	Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah (bid. SDA) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.24.36.28.39.KM	3	2	11
40.	Kurang seriusnya OPD (bid. SDA) dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	ROO.24.36.28.40.KM	2	1	3
41.	Proses pencairan yang lambat diakibatkan tidak lengkapnya berkas administrasi	ROO.24.36.28.41	2	3	10
42.	Data (bid. SDA) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey.	ROO.24.36.28.42.KM	3	2	11
43.	Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan di OPD (bid. SDA)	ROO.24.36.28.43.KM	2	3	10
44.	Proses pencairan yang lambat diakibatkan tidak lengkapnya berkas administrasi	ROO.24.36.28.44	2	3	10
45.	Penyelesaian laporan monitoring yang lama	ROO.24.36.28.45	2	3	10

No.	a	b	c	Analisis Risiko		
				Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
Risiko yang Teridentifikasi		Kode Risiko		d	e	f
46.	Tidak sinkronnya Dokumen Renja OPD (bid. Infrastruktur) dengan dokumen RKPDP Kota Dumai		ROO.24.36.28.46.KM	3	2	11
47.	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJM/RKPD) bidang Infrastruktur		ROO.24.36.28.47.KM	3	2	11
48.	Adanya aspirasi masyarakat dan hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (bid. Infrastruktur) yang belum terakomodir dalam Renja OPD		ROO.24.36.28.48.KM	3	2	11
49.	Masih terdapatnya perangkat daerah tidak menyampaikan data capaian pembangunan di mitra bidang infrastruktur		ROO.24.36.28.49.KM	3	2	11
50.	Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah (bid. Infrastruktur) yang belum terakomodir dalam Renja OPD		ROO.24.36.28.50.KM	3	2	11
51.	Kurang seriusnya OPD (bid. Infrastruktur) dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan		ROO.24.36.28.51.KM	2	1	3
52.	Belum maksimalnya kegiatan asistensi terhadap Perangkat Daerah mitra bidang infrastruktur		ROO.24.36.28.52.KM	2	2	7
53.	Data (bid. Infrastruktur) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey.		ROO.24.36.28.53.KM	3	2	11
54.	Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan di OPD (bid. Infrastruktur)		ROO.24.36.28.54.KM	2	3	10
55.	Tidak tersedianya data pelaksanaan pekerjaan oleh perangkat daerah		ROO.24.36.28.55	3	2	11
56.	Double pencairan perjalanan dinas dalam kota dalam rangka monitoring dengan perjalanan dinas dalam rangka penugasan lainnya di waktu yang bersamaan.		ROO.24.36.28.56	3	2	11
57.	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. Infrastruktur) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional		ROO.24.36.28.57.KM	3	3	14
58.	Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. Infrastruktur) propinsi/nasional yang berlokasi di Kota Dumai		ROO.24.36.28.58.KM	3	3	14
59.	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. Wilayah) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional		ROO.24.36.28.59.KM	2	2	7
60.	Tidak sinkronnya Dokumen Renja OPD (bid. Wilayah) dengan dokumen RKPDP Kota Dumai		ROO.24.36.28.60.KM	3	2	11
61.	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD/RPJM/RKPD) bidang Wilayah		ROO.24.36.28.61.KM	3	3	14
62.	Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (bid. Wilayah) yang belum terakomodir dalam Renja OPD		ROO.24.36.28.62.KM	3	2	11
63.	Terdapat perangkat daerah yang tidak menyampaikan data capaian pembangunan di mitra bidang wilayah		ROO.24.36.28.63.KM	3	3	14

No.	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko			
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko	
a	b	c	d	e	f	
64.	Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah (bid. Kewilayahan) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.24.36.28.64.KM	3	2	11	
65.	Kurang seriusnya OPD (bid. Kewilayahan) dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	ROO.24.36.28.65.KM	2	1	3	
66.	Belum maksimalnya kegiatan asistensi terhadap Perangkat Daerah mitra bidang kewilayahan	ROO.24.36.28.66.KM	2	2	7	
67.	Data (bid. Kewilayahan) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey;	ROO.24.36.28.67.KM	3	2	11	
68.	Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan di OPD (bid. Kewilayahan)	ROO.24.36.28.68.KM	2	3	10	
69.	Tidak tersedianya data pelaksanaan pekerjaan oleh perangkat daerah bid. Kewilayahan	ROO.24.36.28.69	3	2	11	
70.	Double pencairan perjalanan dinas dalam kota dalam rangka monitoring dengan perjalanan dinas dalam rangka penugasan lainnya di waktu yang bersamaan.	ROO.24.36.28.70	3	2	11	
71.	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. Kewilayahan) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.24.36.28.71.KM	3	2	11	
72.	Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. Kewilayahan) propinsi/nasional yang berlokasi di Kota Dumai	ROO.24.36.28.72.KM	3	3	14	
73.	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. Kewilayahan) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.24.36.28.73.KM	2	2	7	



Dumai,
 Pemilik Risiko :
 1. ARIKE TRESMITA, S.Pi, M.Si
 NIP. 19770405 200112 2 003
 2. INSANI TAQWA SAILI, ST
 NIP. 19870929 201001 1 006

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi
- Kolom c diisi dengan kode risiko
- Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta CSA/FGD
- Kolom e diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

KERTAS KERJA
DAFTAR RISIKO PRIORITAS

Nama Pemda : Pemerintah Kota Dumai Tahun Penilaian : 2024 Tujuan Strategis : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai Urusan Pemerintahan : Unsur Penunjang Urusan Pemerintah (Perencanaan)						
No.	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
1.	Risiko Strategis Pemda 1. Rendahnya kualitas dokumen perencanaan	RSP.24.36.01.51	19	Waikota Dumai	1. Kualitas sumber daya aparatur yang menyusun perencanaan belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan (pengangkatan dan penempatan pejabat struktural dan fungsional di Bappedalitbang merupakan kewenangan dari Tim Baperjakat dan Kepala Daerah Kebijakan pemerintah pusat yang sebelumnya tidak ada di dokumen pusat namun muncul sebagai respon atas suatu kejadian/kondisi diluar kebiasaan yang mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian-penyesuaian ketika menyusun dokumen perencanaan tahunan daerah Terlambatnya penerbitan pedoman penyusunan RKPD oleh Kemendagri Proses fasilitasi RKPD di Provinsi terlambat Kurangnya komitmen pimpinan Eselon 2 dan pembekalan manajemen kinerja bagi eselon 2	Kurangnya nilai unsur perencanaan pada penilaian SAKIP Tidak konsistennya dokumen perencanaan tahunan yang mengakomodir kebijakan pusat yang baru sebagai mandat yang harus dilaksanakan dengan penjabaran dokumen RPJMD
2.	Keterlambatan penetapan RKPD	RSP.24.36.01.52	16	Waikota Dumai		Keterlambatan proses tahapan APBD
3.	Cascading eselon 2 belum mendukung pemda secara komprehensif	RSP.24.36.01.53	17	Waikota Dumai		Rendahnya pencapaian target tujuan dan sasaran RPJMD

No.	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
II.	Risiko Strategis OPD					
1.	Dokumen perencanaan perangkat daerah tidak sinkron	RSO.24.36.28.01	16	Kepala Bappeda	Kurang konsistennya Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan	Penyusunan dokumen Perencanaan tidak sesuai jadwal
2.	Penyampaian dokumen perencanaan ke Provinsi tidak tepat waktu	RSO.24.36.28.02	14	Kepala Bappeda	Keterlambatan Perangkat Daerah menyampaikan data; Belum tersedianya regulasi yang mengatur terkait sanksi bagi Perangkat Daerah yang terlambat menyampaikan data Belum memiliki database time series yang tersimpan kedalam sistem e-planning (Sebelum ada SIPD)	Jadwal penyusunan penganggaran menjadi terlambat
III.	Risiko Operasional OPD					
1.	Hasil Evaluasi/rekomendasi tidak diindaklanjuti	ROO.24.36.28.04.KM	16	Kepala Bidang PPM	Pada saat pembahasan dengan PD hanya dihadiri oleh staf	tidak tersampainya informasi ke pejabat di PD
2.	Hasil Evaluasi/rekomendasi tidak diindaklanjuti	ROO.24.36.28.11.KM	16	Kepala Bidang PPM	Pada saat pembahasan dengan PD hanya dihadiri oleh staf	Tidak tersampainya informasi ke pejabat di PD
3.	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJM/RKPD) bidang perekonomian	ROO.24.36.28.22.KM	14	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastwil	Lemahnya koordinasi antara bidang mitra Bappeda/altbang dengan masing-masing OPD mitranya	terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD/RPJM/RKPD) sesuai peraturan yang berlaku
4.	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. perekonomian) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.24.36.28.32.KM	17	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastwil	Dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan belum berpedoman pada perencanaan propinsi dan nasional	Tidak diakomodirnya usulan pemerintah Kota Dumai oleh pemerintah Propinsi/Nasional
5.	Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. perekonomian) propinsi/nasional yang bertokasi di Kota Dumai	ROO.24.36.28.33.KM	14	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastwil	Kurang koordinasi pemerintah Kota Dumai dengan pemerintah Propinsi/Pusat	terlambatnya perkembangan pembangunan di Kota Dumai
6.	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJM/RKPD) bidang SDA	ROO.24.36.28.36.KM	14	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastwil	Kurang koordinasi antara bidang mitra Bappeda/altbang dengan masing-masing OPD mitranya	terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD/RPJM/RKPD) sesuai peraturan yang berlaku
7.	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. Infrastruktur) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.24.36.28.57.KM	14	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastwil	Dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan belum berpedoman pada perencanaan propinsi dan nasional	tidak diakomodirnya usulan pemerintah Kota Dumai oleh pemerintah Propinsi/Nasional

No.	Risiko yang Teridentifikasi b	Kode Risiko c	Skala Risiko d	Pemilik Risiko e	Penyebab f	Dampak g
8.	Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. Infrastruktur) propinsi/nasional yang berlokasi di Kota Dumai	ROO.24.36.28.58.KM	14	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infraswil	Kurangnya koordinasi pemerintah Kota Dumai dengan pemerintah Propinsi/Pusat	terlambatnya perkembangan pembangunan di Kota Dumai
9.	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan (RP/JPD/RP/JMD/RKPD) bidang Kewilayahan	ROO.24.36.28.61.KM	14	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infraswil	lemahnya koordinasi antara bidang mitra Bappedalitbang dengan masing-masing OPD mitranya	terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan (RP/JPD/RP/JMD/RKPD) sesuai peraturan yang berlaku
10.	Terdapatnya perangkat daerah yang tidak menyampaikan data capaian pembangunan di mitra bidang kewilayahan	ROO.24.36.28.63.KM	14	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infraswil	perangkat daerah belum mampu menyediakan data sesuai kemampuan	tidak dapat merencanakan sesuai dengan kebutuhan yang tepat sasaran
11.	Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. Kewilayahan) propinsi/nasional yang berlokasi di Kota Dumai	ROO.24.36.28.72.KM	14	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infraswil	Kurangnya koordinasi pemerintah Kota Dumai dengan pemerintah Propinsi/Pusat	terlambatnya perkembangan pembangunan di Kota Dumai



Mengetahui,

Bappeda,

BAH
NIP. 19740213 199303 1 002

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan risiko prioritas
- Kolom c diisi dengan kode risiko
- Kolom d diisi dengan skala risiko pada Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko
- Kolom e diisi dengan pemilik risiko pada Kertas Kerja Identifikasi Risiko
- Kolom f diisi dengan penyebab pada Kertas Kerja Identifikasi Risiko
- Kolom g diisi dengan dampak pada Kertas Kerja Identifikasi Risiko

Dumai.

Pemilik Risiko :

1. ARIKE TRESMITA, S.Pi, M.Si
NIP.19770405 200112 2 003
2. INSANI TAQWA SAILI,ST
NIP.19870929 201001 1 006

(
(

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)**

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kota Dumai
 Tahun Penilaian : 2024
 Tujuan Strategis : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai
 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik / Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I.	Risiko Strategis Pemda						
1.	Rendahnya kualitas dokumen perencanaan	RSP.24.36.01.51	Peningkatan kapasitas melalui diklat non gelar pada pusdiklatren Bappnas dan lembaga akademis lainnya penyesuaian dokumen rencana tahunan daerah	Masih ada pegawai belum memahami perencanaan pembangunan daerah secara utuh Masih ada kebijakan pusat yang muncul setelah penyesuaian dokumen rencana tahunan	Mengadakan bimbingan teknis, dan diklat mengenai perencanaan pembangunan daerah kepada pegawai Melakukan Koordinasi dan sinkronisasi kepada pemerintah pusat mengenai kebijakan sebelum melakukan penyesuaian dokumen rencana tahunan	Walikota Dumai Walikota Dumai	TW II 2024 TW II 2024
2.	Keterlambatan penetapan RKPD	RSP.24.36.01.52	Koordinasi dan konsultasi ke pemerintah pusat	Pemenuhan hasil fasilitasi sering terkendala ketersediaan data	Melakukan koordinasi dan konsultasi ke pemerintah pusat mengenai data terkait	Walikota Dumai	TW II 2024
3.	Cascading eselon 2 belum mendukung pemda secara komprehensif	RSP.24.36.01.53	Penwako Perubahan Renstra	Cascading belum selaras dengan RPJMD	Melakukan koordinasi dan fasilitasi kepada OPD dalam menyusun cascading agar selaras dengan RPJMD	Walikota Dumai	TW II 2024
II.	Risiko Strategis OPD						
1.	Dokumen perencanaan perangkat daerah tidak sinkron	RSO.24.36.28.01	Melakukan Asistensi dan Koordinasi Dengan Perangkat Daerah	Hasil Asistensi dan Koordinasi hanya di tindak lanjuti oleh Perangkat Daerah pada Staf Perencanaan	Menegaskan kepada Kepala Perangkat Daerah melalui surat Kepala Daerah untuk menindaklanjuti hasil asistensi dan koordinasi terkait perencanaan perangkat daerah	Kepala Bappeda	TW II 2024
2.	Penyampaian dokumen perencanaan ke Provinsi tidak tepat waktu	RSO.24.36.28.02	Melakukan Proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu	Adanya kendala SIPD dan terlambatnya terbitnya Permendagri tentang penyusunan RKPD	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait terutama pihak provinsi dan inspektorat	Kepala Bappeda	TW II 2024
III.	Risiko Operasional OPD						
1.	Hasil Evaluasi/rekomendasi tidak ditindaklanjuti	ROO.24.36.28.04.KM	Menegaskan kepada kepala Perangkat daerah untuk memerintahkan pejabat terkait untuk menghadiri pembahasan	masih adanya pejabat terkait yang berhalangan untuk hadir sehingga informasi hasil evaluasi tidak tersampaikan	Menyampaikan hasil pembahasan dan berita acara pembahasan kepada kepala perangkat daerah atau pejabat terkait	Kepala Bidang PPM	TW II 2024

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik / Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
2.	Hasil Evaluasi/rekomendasi tidak ditindaklanjuti	ROO.24.36.28.11.KM	Menegaskan kepada Kepala Perangkat daerah untuk memerintahkan pejabat terkait untuk menghadiri pembahasan	masih adanya pejabat terkait yang berhalangan untuk hadir sehingga informasi hasil evaluasi tidak tersampaikan	Menyampaikan hasil pembahasan dan berita acara pembahasan kepada kepala perangkat daerah atau pejabat terkait	Kepala Bidang PPM	TW II 2024
3.	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJM/RKPD) bidang perekonomian	ROO.24.36.28.22.KM	Melakukan pendampingan dan koordinasi dengan OPD mitra bidang Perekonomian dalam melakukan penyusunan Renja OPD tersebut	masih adanya OPD yang kurang koordinasi terkait penyusunan Renja OPDnya ke bidang Perekonomian	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi intensif dengan perangkat daerah mitra	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastwil	TW II 2024
4.	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. perekonomian) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.24.36.28.32.KM	Mengkoordinasikan setiap kegiatan bid. perekonomian pada dokumen perencanaan pembangunan daerah serta Renja OPD telah memperhatikan pula prioritas pembangunan propinsi dan nasional	Tidak sesuai kondisi di lapangan dengan data yang diperoleh dari OPD terkait	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait data perangkat daerah mitra	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastwil	TW II 2024
5.	Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. perekonomian) propinsi/nasional yang berfokus di Kota Dumai	ROO.24.36.28.33.KM	melakukan komunikasi dan koordinasi yang lebih intens dengan instansi terkait pada pemerintah propinsi/pusat	Tidak sesuai kondisi di lapangan dengan data yang diperoleh dari OPD terkait	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait data perangkat daerah mitra	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastwil	TW II 2024
6.	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJM/RKPD) bidang SDA	ROO.24.36.28.36.KM	Melakukan pendampingan dan koordinasi dengan OPD mitra bidang SDA dalam melakukan penyusunan Renja OPD tersebut	masih adanya OPD yang kurang koordinasi terkait penyusunan Renja OPDnya ke bidang SDA	Bidang SDA lebih intens untuk mendampingi OPD mitranya dalam menyusun renja	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastwil	TW II 2024
7.	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. Infrastruktur) dengan dokumen Perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.24.36.28.57.KM	Mengkoordinasikan setiap kegiatan bid. infrastruktur pada dokumen perencanaan pembangunan daerah serta Renja OPD telah memperhatikan pula prioritas pembangunan propinsi dan nasional	Tidak sesuai kondisi di lapangan dengan data yang diperoleh dari OPD terkait	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait data perangkat daerah mitra	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastwil	TW II 2024
8.	Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. Infrastruktur) propinsi/nasional yang berfokus di Kota Dumai	ROO.24.36.28.58.KM	melakukan komunikasi dan koordinasi yang lebih intens dengan instansi terkait pada pemerintah propinsi/pusat	Tidak sesuai kondisi di lapangan dengan data yang diperoleh dari OPD terkait	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait data perangkat daerah mitra	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastwil	TW II 2024

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik / Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
9.	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD/RPJMD/RKPD) bidang Kewilayahan	ROO.24.36.28.61.KM	Melakukan pendampingan dan koordinasi dengan OPD mitra bidang Infrastruktur dalam melakukan penyusunan Renja OPD tersebut	masih adanya OPD yang kurang koordinasi terkait penyusunan Renja OPDnya ke bidang Infrastruktur	Bidang Infrastruktur lebih intens untuk mendampingi OPD mitranya dalam menyusun renja	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastwil	TW II 2024
10.	Terdapatnya perangkat daerah yang tidak menyampaikan data capaian pembangunan di mitra bidang kewilayahan	ROO.24.36.28.63.KM	Melakukan komunikasi kepada perangkat daerah melalui surat dinas perihal permohonan data capaian pembangunan	Masih adanya perangkat daerah yang mengabaikan surat dinas dan tidak menyampaikan data capaian pembangunan	Melakukan komunikasi lebih intens kepada perangkat daerah mengenai permohonan penyampaian data capaian pembangunan bidang kewilayahan	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastwil	TW II 2024
11.	Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. Kewilayahan) propinsi/nasional yang berfokus di Kota Dumai	ROO.24.36.28.72.KM	melakukan komunikasi dan koordinasi yang lebih intens dengan instansi terkait pada pemerintah propinsi/pusat	Tidak sesuai kondisi di lapangan dengan data yang diperoleh dan OPD terkait	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait data perangkat daerah mitra	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastwil	TW II 2024



Dumai,
Pemilik Risiko :
1. ARIKE TRESMITA, S.Pi, M.Si
NIP.19770405 200112 2 003
2. INSANI TAQWA SAILI,ST
NIP.19870929 201001 1 006

()
()

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan risiko prioritas
- Kolom c diisi dengan kode risiko
- Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.
- Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif.
 - (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi.
 - (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan.
 - (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas.
 - (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya
- Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan
- Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian
- Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Rencana dan Realisasi Pemantauan atas Kegiatan Pengendalian Intern yang Dibutuhkan

Nama Pemerintah Daerah
Tahun Penilaian
Tujuan Strategis
Urusan Pemerintahan

: Pemerintah Kota Dumai
: 2024
: Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai
: Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)

No.	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1.	Mengadakan bimbingan teknis, dan diikat mengenai perencanaan pembangunan daerah kepada pegawai	Mengumpulkan sertifikat hasil dari bimbingan teknis dan diklat perencanaan pembangunan	Walikota Dumai	TW IV 2024	TW I s.d TW IV	
2.	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kepada pemerintah pusat mengenai kebijakan sebelum melakukan penyesuaian dokumen rencana tahunan	Melakukan konfirmasi melalui laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah pusat	Walikota Dumai	TW IV 2024	TW I s.d TW III	
3.	Melakukan koordinasi dan konsultasi ke pemerintah pusat mengenai data terkait	Melakukan konfirmasi melalui laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah pusat	Walikota Dumai	TW IV 2024	TW I s.d TW III	
4.	Melakukan koordinasi dan fasilitasi kepada OPD dalam menyusun cascading agar selaras dengan RPJMD	Melakukan konfirmasi melalui laporan Keselarasan antara cascading dengan RPJMD	Walikota Dumai	TW IV 2024	TW I s.d TW III	
5.	Menegaskan kepada Kepala Perangkat Daerah melalui surat Kepala Daerah untuk menindaklanjuti hasil asistensi dan koordinasi terkait perencanaan perangkat daerah	Melakukan konfirmasi dan verifikasi terkait dokumen perencanaan daerah	Kepala Bappeda	TW IV 2024	TW I s.d TW III	
6.	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait terutama pihak provinsi dan inspektorat	Melakukan koordinasi dengan provinsi dan inspektorat terkait pelaksanaan koordinasi	Kepala Bappeda	TW IV 2024	TW I s.d TW III	
7.	Menyampaikan hasil pembahasan dan berita acara pembahasan kepada kepala perangkat daerah atau pejabat terkait	Mengkoordinir hasil evaluasi/rekomendasi tindak lanjut	Kepala Bidang PPM	TW IV 2024	TW I	
8.	Menyampaikan hasil pembahasan dan berita acara pembahasan kepada kepala perangkat daerah atau pejabat terkait	Mengkoordinir hasil evaluasi/rekomendasi tindak lanjut	Kepala Bidang PPM	TW IV 2024	TW I	
9.	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait data perangkat daerah mitra	Melakukan konfirmasi melalui surat dan asistensi langsung dengan perangkat daerah	Kepala Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Perekonomian dan SDA	TW IV 2024	TW I s.d TW II	

No.	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
10.	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait data perangkat daerah mitra	Melakukan konfirmasi melalui surat dan asistensi langsung dengan perangkat daerah	Kepala Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Perencanaan dan SDA	TW IV 2024	TW I s d IV	
11.	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait data perangkat daerah mitra	Melakukan konfirmasi melalui surat dan asistensi langsung dengan perangkat daerah	Kepala Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Perencanaan dan SDA	TW IV 2024	TW I s d IV	
12.	Bidang SDA lebih intens untuk mendampingi OPD mitranya dalam menyusun renja	Melakukan konfirmasi melalui laporan/notulensi/berita acara	Kepala Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Perencanaan dan SDA	TW IV 2024	TW I s d IV	
13.	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait data perangkat daerah mitra	Melakukan konfirmasi melalui surat dan asistensi langsung dengan perangkat daerah	Kepala Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Perencanaan dan SDA	TW IV 2024	TW I s d IV	
14.	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait data perangkat daerah mitra	Melakukan konfirmasi melalui surat dan asistensi langsung dengan perangkat daerah	Kepala Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Perencanaan dan SDA	TW IV 2024	TW I s d IV	
15.	Bidang Infrastruktur lebih intens untuk mendampingi OPD mitranya dalam menyusun renja	Melakukan konfirmasi melalui laporan/notulensi/berita acara	Kepala Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Perencanaan dan SDA	TW IV 2024	TW I s d IV	
16.	Melakukan komunikasi lebih intens kepada perangkat daerah mengenai permohonan penyampaian data capaian pembangunan bidang kewilayahan	Melakukan konfirmasi melalui surat dan asistensi langsung dengan perangkat daerah	Kepala Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Perencanaan dan SDA	TW IV 2024	TW I s d IV	
17.	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait data perangkat daerah mitra	Melakukan konfirmasi melalui surat dan asistensi langsung dengan perangkat daerah	Kepala Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Perencanaan dan SDA	TW IV 2024	TW I s d IV	

Dumai,
 Pemilik Risiko :
 1. ARIKE TRESMITA, S.Pi, M.Si
 NIP. 19770405 200112 2 003
 2. INSANI TAQWA SAILI, ST
 NIP. 19870929 201001 1 006



Keter: Kolom a diisi dengan nomor surat
 Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
 Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan
 Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan
 Kolom e diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan
 Kolom f diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan
 Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan hasil kegiatan pemantauan, pelaksanaan monitoring, pendokumentasian, pendistribusian, dan kt